



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Jl. Pemuda No. 294 Telp. 0272-321046 Fax. 322567
Teleks 325637 Klaten 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk:* (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah,

(c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap issue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta sebagai upaya untuk mewujudkan: *Masyarakat Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.*

Klaten, 29 Januari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

INSPEKTORAT

Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
KLATEN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

JAJANG PRIHONO, S.STP
Pembina
NIP. 19810216 199912 1 001

Eksekutif Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Memedomani sebagaimana ketentuan di atas, serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh tujuh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 7 (*tujuh*) atau sebanyak 10,45% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 1 (*satu*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 1,49% dengan kriteria ***Sedang***; dan
- e. Sebanyak 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 14,93% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:
 1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;

6. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 7. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 8. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
 10. Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
 11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
 12. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 13. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
 14. Level Maturitas SPIP;
 15. Level Kapabilitas APIP;
 16. Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah;
 17. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 18. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
 19. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 20. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
 21. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;
 22. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
 23. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
 24. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
 25. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
 26. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
 27. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
 28. Prosentase inovasi yang diterapkan;
 29. Angka partisipasi angkatan kerja;
 30. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 31. Indeks layanan infrastruktur;
 32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
 33. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 34. Ketaatan terhadap RTRW;
 35. Indeks Kualitas Air;
 36. Indeks Kualitas Udara;
 37. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 38. Indeks Demokrasi;
 39. Indeks Ketertiban Masyarakat;
 40. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 41. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
 42. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat; dan
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan *Kriteria Tinggi*, atau interval nilai realisasi kinerja $75,1 \leq 90$ sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 10,45%, diantaranya:
1. Indeks Profesionalitas ASN;
 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;

3. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
 4. Rasio penduduk yang bekerja;
 5. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
 6. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA); dan
 7. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 1 (*satu*) indikator atau 1,49%, yaitu: Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan).
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 10 (sepuluh) indikator atau 14,92%, diantara:
1. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;
 2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
 3. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
 4. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 5. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;
 6. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
 7. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
 8. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan; dan
 9. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.
 10. Persentase IKM yang memiliki daya saing.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 5 (*lima*) indikator, atau 7,46%, diantaranya:

1. Angka Kematian Bayi;
2. Angka Kematian Balita;
3. Tingkat Inflasi YoY;
4. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR; dan
5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 2 (*dua*) indikator atau 2,99%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu; dan
2. Prevalensi gizi buruk (BB/U).

Selanjutnya untuk mengimplementasikan tujuan jangka menengah Daerah, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 97% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi sebanyak 51 indikator sasaran (atau 76,12% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang tidak efisien sebanyak 16 indikator sasaran (atau 23,88% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Sedangkan jumlah program yang tidak efisiensi dalam mendukung pencapaian sasaran sebanyak 27 program (atau 16,46% dari 164 program prioritas), dan sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas). Berdasarkan Tabel 3.102 dan Tabel 3.103, sebagaimana tersebut di atas jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*) sebanyak Rp.749.734.071.372,- dan terealisasi sebanyak Rp.618.720.315.867,- serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 56 indikator sasaran (atau 83,58% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan jumlah program yang mencapai efisiensi sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas), maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp. 131.013.755.505,- {dengan perhitungan: Jumlah rencana anggaran dikurangi realisasi anggaran}.

Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Eksekutif Summary	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	xv
Daftar Diagram.....	xvii
Daftar Gambar.....	xviii

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah	I-2
	1.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	I-10
	1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-16
	1.5 Isu Strategis.....	I-18
BAB II	PERENCANAAN	II-1
	2.1 Rencana Strategis	II-1
	2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020	II-13
	2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis.....	II-16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	III-10
	3.3 Akuntabilitas Anggaran	III-144
	3.4 Efektifitas Sumber Daya Aparatur.....	III-186
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1 Kesimpulan.....	IV-1
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV-2

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-4
Tabel 1.2	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-5
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-7
Tabel 1.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-8
Tabel 1.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 (dalam Rp.Juta).....	I-12
Tabel 1.6	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dlm Juta Rupiah).....	I-14
Tabel 1.7	Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-16
Tabel 1.8	Jumlah dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020.....	I-17
Tabel 1.9	Manajemen Pengelolaan ASN Tahun 2016-2020.....	I-17
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	II-8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	II-13
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020....	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.....	III-10
Tabel 3.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	III-12
Tabel 3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	III-13
Tabel 3.7	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-14
Tabel 3.8	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-16
Tabel 3.9	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	III-16

Tabel 3.10	Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-18
Tabel 3.11	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020.....	III-18
Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan.....	III-21
Tabel 3.13	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-22
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).....	III-26
Tabel 3.15	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel 3.16	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel 3.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.....	III-30
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM.....	III-34
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	III-37
Tabel 3.20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-37
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.....	III-39
Tabel 3.22	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-39
Tabel 3.23	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-40
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan.....	III-42
Tabel 3.25	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-42
Tabel 3.26	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020.....	III-43
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	III-44
Tabel 3.28	Capaian Indeks Profesionalitas ASN.....	III-44
Tabel 3.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-47
Tabel 3.30	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-48

Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	III-50
Tabel 3.32	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2016-2020.....	III-50
Tabel 3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-52
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD.....	III-53
Tabel 3.35	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-54
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.....	III-55
Tabel 3.37	Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2016-2020.....	III-56
Tabel 3.38	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	III-57
Tabel 3.39	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten.....	III-59
Tabel 3.40	Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten.....	III-60
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.....	III-63
Tabel 3.42	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	III-65
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.....	III-67
Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel.....	III-68
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan.....	III-70
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	III-71
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	III-73
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	III-75
Tabel 3.49	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nin Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020.....	III-75
Tabel 3.50	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-76
Tabel 3.51	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016-2020.....	III-77
Tabel 3.52	Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020.....	III-77
Tabel 3.53	Populasi Ternak Tahun 2016-2020.....	III-78
Tabel 3.54	Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2016-2020.....	III-78

Tabel 3.55	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	III-81
Tabel 3.56	Lembaga Ekonomi Perdesaan.....	III-81
Tabel 3.57	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2016-2020.....	III-82
Tabel 3.58	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.....	III-84
Tabel 3.59	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020.....	III-85
Tabel 3.60	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-85
Tabel 3.61	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	III-86
Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.....	III-90
Tabel 3.63	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	III-92
Tabel 3.64	Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.....	III-92
Tabel 3.65	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal.....	III-99
Tabel 3.66	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020.....	III-99
Tabel 3.67	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2016-2020.....	III-100
Tabel 3.68	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2016-2020.....	III-100
Tabel 3.69	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan.....	III-102
Tabel 3.70	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	III-104
Tabel 3.71	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian.....	III-106
Tabel 3.72	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat.....	III-108
Tabel 3.73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan.....	III-110
Tabel 3.74	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2016-2020.....	III-110
Tabel 3.75	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	III-111

Tabel 3.76	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman.....	III-112
Tabel 3.77	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang.....	III-114
Tabel 3.78	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-116
Tabel 3.79	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana.....	III-119
Tabel 3.80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi.....	III-122
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.....	III-123
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-125
Tabel 3.83	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2016-2020.....	III-126
Tabel 3.84	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2016-2020.....	III-127
Tabel 3.85	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2016-2020.....	III-127
Tabel 3.86	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.....	III-130
Tabel 3.87	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-131
Tabel 3.88	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2016-2020.....	III-131
Tabel 3.89	Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-132
Tabel 3.90	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020.....	III-133
Tabel 3.91	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan.....	III-134
Tabel 3.92	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2016-2020.....	III-135
Tabel 3.93	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III-135
Tabel 3.94	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-137
Tabel 3.95	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas.....	III-138
Tabel 3.96	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-139
Tabel 3.97	Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020.....	III-139

Tabel 3.98	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian.....	III-140
Tabel 3.99	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2016-2020.....	III-141
Tabel 3.100	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	III-144
Tabel 3.101	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	III-167
Tabel 3.102	Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	III-186

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-6
Grafik 1.2	Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	I-6
Grafik 1.3	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020.....	I-8
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016-2020.....	I-9
Grafik 1.5	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016-2020.....	I-10
Grafik 1.6	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2016-2020.....	I-11
Grafik 1.7	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	I-15
Grafik 1.8	Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	I-16
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-11
Grafik 3.2	Perkembangan Angka Rata-lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-12
Grafik 3.3	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020.....	III-14
Grafik 3.4	Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-15
Grafik 3.5	Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020.....	III-17
Grafik 3.6	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	III-21
Grafik 3.7	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-23
Grafik 3.8	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-23
Grafik 3.9	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	III-24
Grafik 3.10	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-31
Grafik 3.11	Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).....	III-31
Grafik 3.12	Perkembangan Indikator BOR Tahunan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).....	III-32
Grafik 3.13	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016-2020.....	III-34

Grafik 3.14	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	III-72
Grafik 3.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2020.....	III-117
Grafik 3.16	Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021..	III-120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan.....	I-3
------------	---	-----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	II-11
Diagram 2.2	Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah.....	II-12
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif.....	III-8
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif.....	III-9



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa untuk menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
1.5 Isu Strategis

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun



2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah perjanjian dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan *bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi* yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan **Perjanjian Kinerja** yang disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

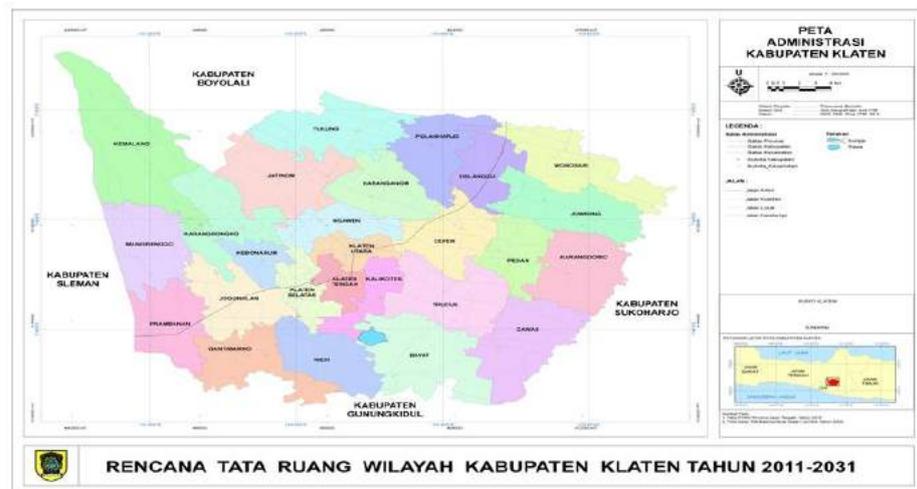


b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689 RW dan 9.592 RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2014-2018 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2018 menjadi 33.066 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2018 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan data bersih sebanyak 1.323.609 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,51% dan kepadatan penduduk 2019,05 jiwa/km². Tahun 2020 jumlah penduduk menjadi sebanyak 1.327.577 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,30% dan kepadatan penduduk 2025 jiwa/km². Gambaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan (Jiwa)	Laju (%)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
		2016	2017	2018	2019	2020			
1	Prambanan	51.861	52.112	52.662	52.824	52.957	133	0,25	2168
2	Gantiwarno	40.618	41.060	40.609	40.696	41.443	747	1,80	1616
3	Wedi	53.673	54.068	54.681	54.507	54.672	165	0,30	2242
4	Bayat	64.399	64.680	65.148	65.649	65.771	122	0,19	1668
5	Cawas	60.509	60.047	61.359	60.690	60.704	14	0,02	1761
6	Trucuk	79.930	79.409	80.740	81.715	82.226	511	0,62	2432
7	Kalikotes	37.465	37.877	37.943	38.116	38.217	101	0,26	2944
8	Kebonarum	20.833	20.532	20.910	20.935	21.140	205	0,97	2186
9	Jogonalan	59.725	59.808	61.117	61.237	61.927	690	1,11	2319
10	Manisrenggo	43.521	43.245	44.181	44.373	44.336	-37	-0,08	1645
11	Karangnongko	37.613	37.371	38.247	38.096	38.367	271	0,71	1435
12	Ceper	65.589	66.196	66.963	67.619	68.188	569	0,83	2784
13	Ngawen	46.037	46.697	46.697	47.368	47.304	-64	-0,14	2790
14	Pedan	48.235	48.592	48.831	48.990	49.000	10	0,02	2556
15	Karangdowo	45.617	46.144	45.176	45.256	45.557	301	0,66	1559
16	Juwiring	60.211	60.953	60.686	61.155	61.325	170	0,28	2059
17	Wonosari	64.846	64.494	64.760	64.770	64.355	-415	-0,64	2067
18	Delanggu	43.354	43.917	43.248	43.661	43.505	-156	-0,36	2318
19	Polanharjo	42.551	42.886	42.783	42.969	43.179	210	0,49	1811

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan (Jiwa)	Laju (%)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
		2016	2017	2018	2019	2020			
20	Karanganom	47.111	47.102	47.585	47.602	47.406	-196	-0,41	1970
21	Tulung	54.401	55.386	55.283	55.419	55.805	386	0,69	1744
22	Jatinom	60.262	61.475	61.905	62.312	62.183	-129	-0,21	1750
23	Kemalang	38.502	39.467	39.721	40.064	40.343	279	0,69	781
24	Klaten Selatan	44.474	44.518	44.965	45.687	45.546	-141	-0,31	3156
25	Klaten Tengah	41.907	42.361	42.264	42.634	42.865	231	0,54	4805
26	Klaten Utara	47.462	48.315	48.416	49.265	49.256	-9	-0,02	4745
Jumlah		1.300.706	1.308.712	1.316.880	1.323.609	1.327.577	3.968	0,30	2025

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2021. (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1. sebagaimana tersebut di atas, tahun 2020 jumlah penduduk menjadi sebanyak 1.327.577 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,30%, dan pertumbuhan penduduk sebanyak 3.968 jiwa dan kepadatan penduduk 2025 jiwa/km². Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) dari tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel 1.2.

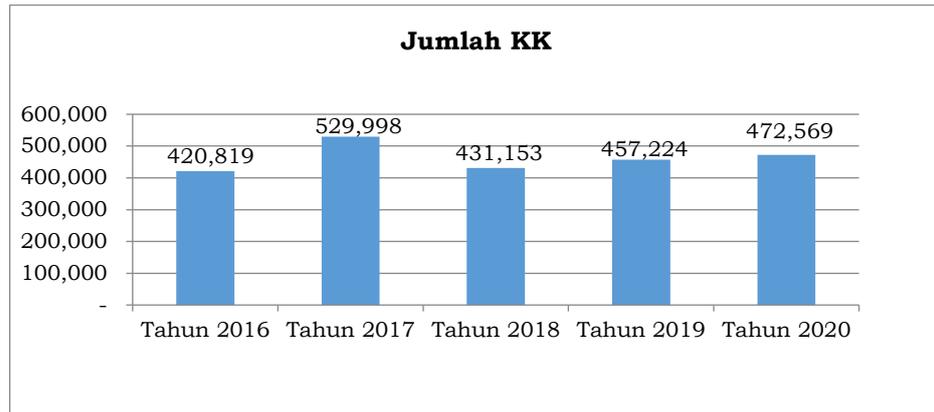
Tabel 1.2.
Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
1	2016	273.523	902.113	125.070	1.300.706	44,18%
2	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
3	2018	263.474	911.174	142.232	1.316.880	44,53%
4	2019	272.466	903.579	147.564	1.323.609	46,49%
5	2020	269.329	912.459	145.789	1.327.577	45,49%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2021. (Diolah)

Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 431.153 KK pada tahun 2018 menjadi 457.224 KK pada tahun 2019 (atau bertambah sebanyak 26.071 KK), dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 472.569 KK. Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 1.1.



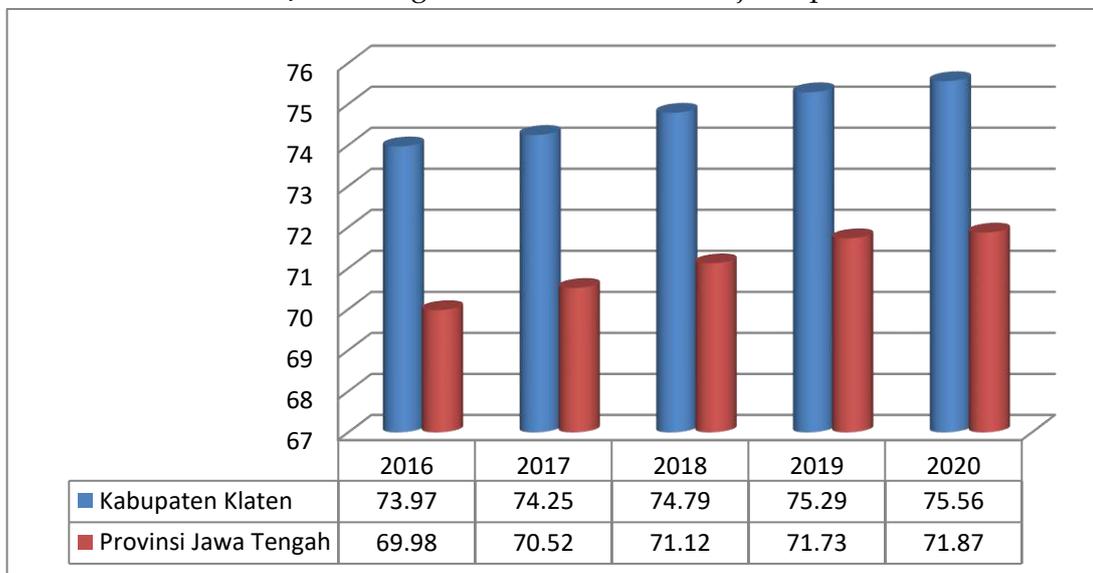


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2021 (diolah)
 Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Perkembangan angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 1.2.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2016-2020. Update Terakhir 18 Desember 2020.
 Grafik 1.2. Perkembangan Angka IPM Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Berdasarkan Grafik 1.2. di atas Angka IPM Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 perkembangannya di atas rerata Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui perkembangan komponen pembentuk IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,59	76,68	76,67	76,68	76,78
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,22	8,24	8,24	8,31	8,58
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	12,94	13,13	13,24	13,25
Pengeluaran Riil Per Kapita (dalam Ribuan Rp.)	11.276	11.369	11.738	12.074	11.921
IPM	73,97	74,25	74,79	75,29	75,56

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2016-2020. Update Terakhir 18 Desember 2020.

1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.4.



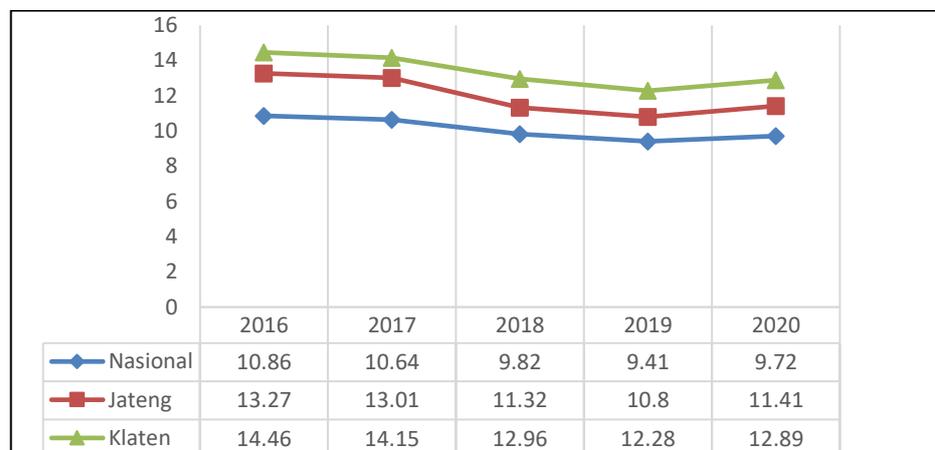
Tabel 1.4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	1.486.426	1.163.218	168.010	14,46
2017	1.308.712	1.167.411	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.730	12,96
2019	1.323,609	1.174.986	144.140	12,28
2020	1.327.577	1.178.501	151.800	12,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2020. Update Data Terakhir 15 Desember 2020.

Pada tahun 2020 angka persentase penduduk miskin mengalami penambahan sebesar 0,61% dibanding tahun 2019, hal ini didorong adanya pandemi Covid-19, sekalipun percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pengendalian inflasi dan lain-lain.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 1.3.

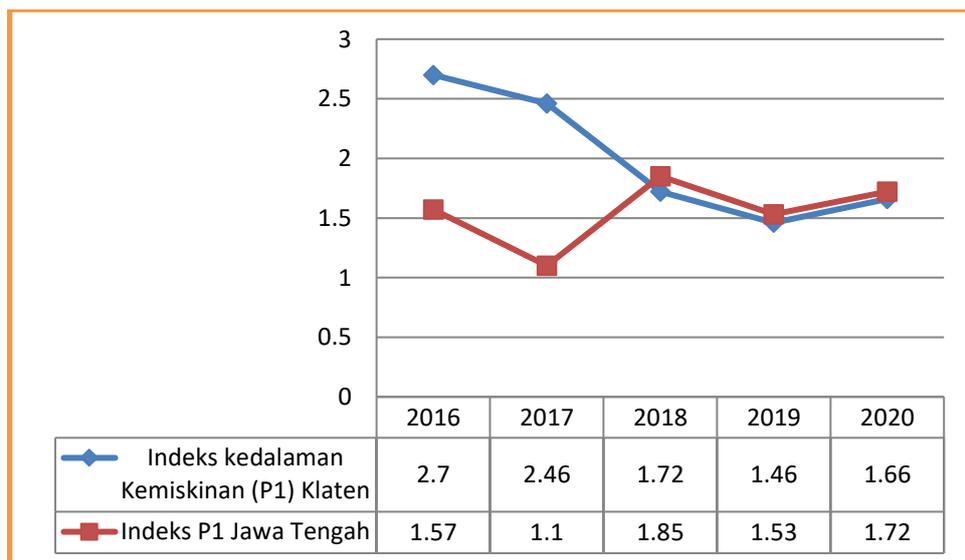


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020. Update Terakhir 15 Desember 2020.
Grafik 1.3. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020.

Peningkatan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan dampak Pandemi *Covid-19*, sekalipun dukungan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor dirasa cukup signifikan. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan kesulitan penurunan kemiskinan karena terjadinya *inclusion error* yaitu kesalahan sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menerima bantuan alih-alih warga miskin. "*Ada exclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima, begitu pula sebaliknya. Orang tidak miskin malah dapat bantuan*".

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2016-2020

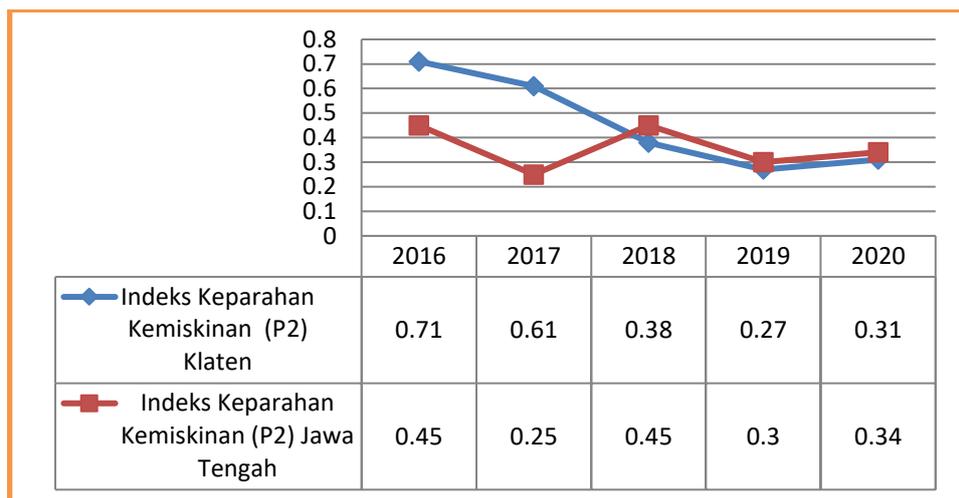
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020. Update Terakhir 15 Desember 2020.

Pada Grafik 1.4. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 1,66 posisinya di bawah Provinsi Jawa Tengah (1,72).



a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 1.5.



Grafik 1.5. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020.
 Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020. Update Terakhir 15 Desember 2020.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten pada tahun 2020 (0,31) di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,34).

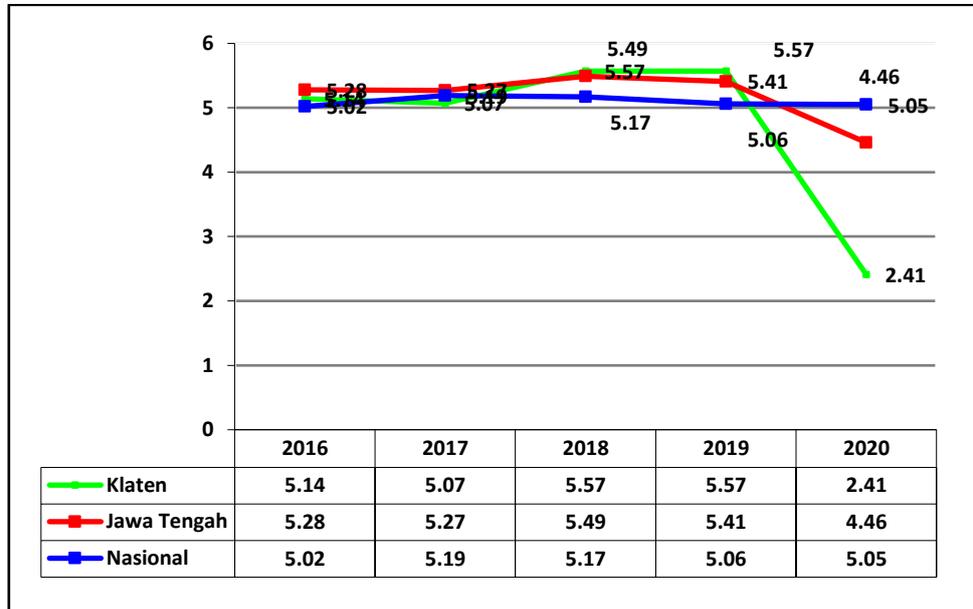
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2015 sebesar 5,30%, Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,44%, dan tahun 2019 menjadi 5,57% hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19



pertumbuhan ekonomi di daerah sampai nasional mengalami kontraksi pada kisaran -3,49%.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada Grafik 1.6.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2020 (diolah).

Grafik 1.6. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.

*J) Angka tahun 2020 untuk Jawa Tengah dan Nasional angka sementara

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2016-2020 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020*	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.814.072,15	2,99	2.845.097,06	1,10	2.908.070,61	2,21	2.943.761,34	1,23	2.979.380,85	10,45
2	Pertambangan dan Penggalian	635.553,28	2,93	664.166,20	4,50	685.313,55	3,18	706.900,93	3,15	713.475,11	2,50
3	Industri Pengolahan	8.004.239,75	6,15	8.504.714,04	6,25	9.013.718,21	5,98	9.601.710,72	6,52	9.840.793,32	34,53
4	Pengadaan Listrik dan gas	41.588,12	6,20	44.249,82	6,40	47.094,12	6,43	49.644,40	5,42	51.153,59	0,18
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.047,34	2,16	12.826,81	6,47	13.532,60	5,50	14.308,02	5,73	14.820,25	0,05
6	Konstruksi	1.435.985,49	5,87	1.531.575,76	6,66	1.635.233,26	6,67	1.745.775,03	6,76	1.798.148,28	6,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.061,18	3,63	4.531.078,43	3,37	4.719.954,10	4,17	4.923.412,16	4,31	5.040.097,03	17,68
8	Transportasi dan Pergudangan	566.772,32	4,07	597.101,45	5,35	625.692,51	4,79	656.720,86	4,96	569.836,69	2,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883.680,17	6,11	944.707,06	6,91	1.018.074,62	7,77	1.098.344,48	7,78	1.048.259,97	3,68
10	Informasi dan Komunikasi	908.551,37	7,56	1.026.807,26	13,02	1.147.054,83	11,71	1.282.866,12	11,84	1.468.496,85	5,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	821.907,83	7,07	857.588,05	4,34	887.591,04	3,50	915.313,03	3,12	957.783,55	3,36
12	Real Estate	361.069,45	6,23	382.324,67	5,89	401.354,47	4,98	420.057,59	4,66	427.828,66	1,50
13	Jasa Perusahaan	77.484,45	9,19	83.734,52	8,07	90.076,27	7,57	96.931,07	7,61	94.071,60	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	591.863,52	2,96	610.862,34	3,31	631.265,14	3,34	641.455,60	1,61	650.692,56	2,28
15	Jasa Pendidikan	1.520.064,74	5,66	1.607.474,21	5,75	1.720.461,03	7,03	1.842.721,54	7,11	1.939.280,15	6,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	260.226,42	7,86	282.328,51	8,49	307.894,68	9,06	336.313,36	9,23	373.139,67	1,31
17	Jasa Lainnya	428.573,40	8,03	466.467,08	8,84	508.328,89	8,97	553.417,66	8,87	532.498,47	1,67
Produk Domestik Regional Bruto		23.725.740,98	5,17	24.983.103,27	5,34	26.360.649,93	5,47	27.829.653,91	5,57	28.499.756,60	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020. Update Data Terakhir 2 Maret 2020.

*) angka sementara

Berdasarkan Tabel 1.5. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.22.558.976,15 juta pada tahun 2015, meningkat menjadi sebesar Rp. 27.829.653,91 juta pada tahun 2019 (atau rata-rata naik 4,67%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2019 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan perubahan iklim, adanya serangan hama dan lambatnya peningkatan produksi maupun produktifitas yang berakibat lambatnya nilai tambah sektor pertanian.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sektor lain yang protektif, dan tumbuh pesat adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini tumbuh tidak saja ditunjukkan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.6.



Tabel 1.6.
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
 Tahun 2016-2020 (dln Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020*)	
		Nilai (juta Rp.)	(%)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.810.348,98	5,19	3.880.677,98	1,85	4.085.464,24	5,28	4.206.652,77	2,97	4.270.173,33	10,45
2	Pertambangan dan Penggalian	1.030.613,84	7,88	1.112.144,57	7,91	1.177.376,22	5,87	1.245.553,58	5,79	1.260.873,89	3,08
3	Industri Pengolahan	11.381.482,63	11,82	12.446.837,51	9,36	13.611.869,50	9,36	14.726.080,24	8,19	15.136.937,88	37,03
4	Pengadaan Listrik dan gas	44.053,13	11,07	50.784,96	15,28	55.741,58	9,76	58.861,29	5,60	60.827,26	0,15
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.246,78	4,32	14.143,63	6,77	14.964,95	5,81	16.371,66	9,40	17.006,88	0,04
6	Konstruksi	1.914.709,83	7,56	2.094.601,40	9,40	2.333.361,55	11,40	2.552.697,54	9,40	2.636.936,56	6,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.292.431,30	6,97	5.631.766,56	6,41	6.000.014,15	6,54	6.430.015,48	7,17	6.601.696,89	16,15
8	Transportasi dan Pergudangan	645.183,06	4,95	690.596,13	7,04	729.681,82	5,66	779.971,91	6,89	679.121,5	1,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091.254,92	11,94	1.180.067,24	8,14	1.284.456,54	8,85	1.404.195,46	9,32	1.344.376,73	3,29
10	Informasi dan Komunikasi	948.913,65	7,77	1.119.938,75	18,02	1.252.092,63	11,80	1.419.789,34	13,39	1.629.492,23	3,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.081.527,12	9,71	1.175.828,75	8,72	1.259.961,03	7,16	1.321.513,91	4,89	1.386.796,70	3,39
12	Real Estate	409.338,03	7,42	444.310,49	8,54	477.618,78	7,50	509.514,95	6,68	520.469,52	1,27
13	Jasa Perusahaan	102.585,38	13,40	115.088,85	12,19	126.797,73	10,17	139.716,72	10,19	129.336,47	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792.119,46	8,37	844.376,28	6,60	882.410,22	4,50	908.656,78	2,97	924.467,41	2,26
15	Jasa Pendidikan	2.160.832,68	8,90	2.379.643,26	10,13	2.606.214,15	9,52	2.881.198,28	10,55	3.040.816,66	7,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	372.019,69	9,63	409.870,96	10,17	452.676,88	10,44	495.228,51	9,40	550.941,72	1,35
17	Jasa Lainnya	528.580,71	12,30	584.142,53	10,51	642.768,49	10,04	703.188,73	9,40	678.717,76	1,66
	Produk Domestik Regional Bruto	31.619.241,19	8,78	34.174.819,85	9,24	36.993.470,46	8,21	39.799.207,15	7,78	40.875.667,08	2,70

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020. Update Data Terakhir Per 2 Maret 2020.

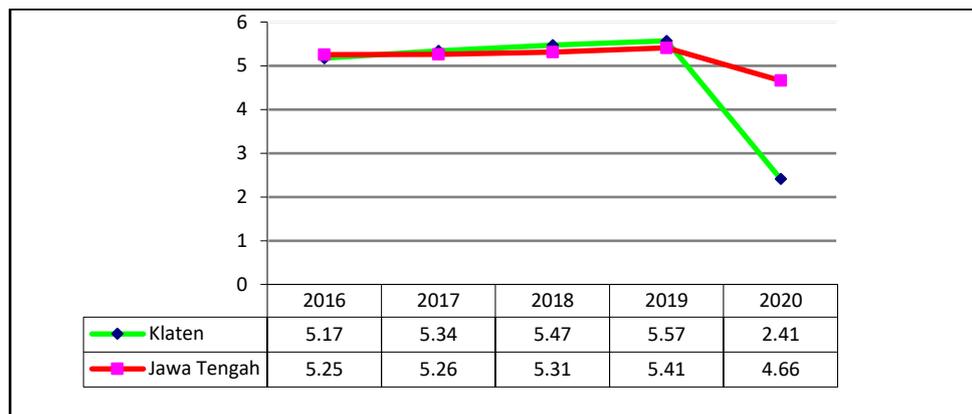
*) angka sementara



Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 31.619.241,19 juta pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar Rp.40.875.667,08 juta pada tahun 2020 (atau naik 22,65%).

Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang sifatnya fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada tahun 2020, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 37,03% atau Rp.15.136.937,88 juta, dan sumbangan terendah dari sektor Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebanyak Rp.17.006,88 Juta (atau dengan daya tumbuh 0,04%).

Sedangkan sebagai gambaran Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 sebagaimana Grafik 1.7.



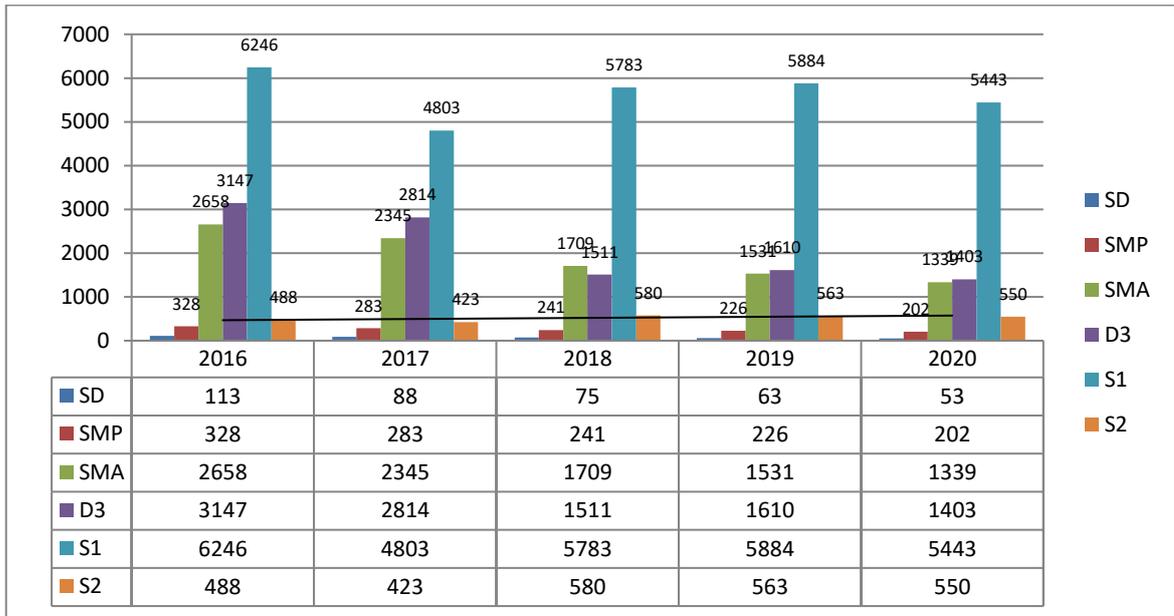
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, Update Terakhir per Maret 2020.

Grafik 1.7. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir (2017-2019) sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, hal ini menandakan perkembangan perekonomian di Kabupaten Klaten jauh lebih baik dibanding rerata Provinsi. Pertumbuhan pada tahun 2020 Jawa Tengah dengan asumsi TW-III.

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada tahun 2019 sebanyak 9.877 orang, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 8.990 orang (atau turun 8,98%). Gambaran singkat profil jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.8.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Grafik 1.8 Profil Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 1.8. sebagaimana tersebut di atas, apabila dilihat dari peta penyebaran jumlah jabatan ASN Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Jabatan ASN Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah	Orang	22	21	27	26	24
Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	Orang	4.073	3.450	2.935	2.855	2.664
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	8.833	7.179	6.963	6.940	6.449

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas, dari tahun ke tahun jumlah jabatan baik pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan persyaratan jabatan yang harus diikuti ASN belum terpenuhi. Berikut ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8
ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	95,43	78,52	99	116	11,26
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	32,29	44,98	52,46	60,25	60,13

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.8. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maupun Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural setiap tahunnya cenderung menurun, hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat. Sedangkan manajemen pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
Manajemen Pengelolaan ASN
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	Na	81,20	62	77,5	78,06
Indeks Sistem Merit	Indeks	Na	Na	Na	Na	241
Persentase ASN yang Mengikuti Diklat	%	95,43	79,52	99	116	11,26
Persentase Layanan Sumber Daya Aparatur	%	76,74	93,66	93,75	95	90
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	78	48	52	56	100
Persentase Informasi Kepegawaian yang Akurat	%	98,73	94	90	80	54
Persentase Pengembangan Aparatur	%	66,04	76	83	96	70

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.9. sebagaimana tersebut di atas, kondisi pembinaan dan manajemen ASN cenderung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan situasi dan kebijakan Daerah terkait dengan tata kelola ASN.



1.5. Isu Strategis

Rumusan Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) Kabupaten Klaten Tahun 2020, diantaranya:

a. Tata Kelola Pemerintahan

Upaya untuk melaksanakan **Otonomi Daerah** itu adalah adalah mewujudkan *Good Governance*. Salah satu penghambat penerapan *good governance* adalah reformasi birokrasi di daerah yang belum berjalan mulus. Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik dalam hal memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. Penguatan Ekonomi Daerah

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebesar 5,07 % masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,27%) dan nasional (5,19%). 3 Sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten antara lain Industri pengolahan sebesar 34 %, diikuti sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,13 %, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,42 %.

Upaya penguatan ekonomi daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan subsektor terkait perlu dikembangkan dan dikelola secara berencana menurut dukungan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Kualitas Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan, karena pengembangan suatu daerah tidak lepas dari pengembangan sumber daya manusianya. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan.

Beberapa persoalan pendidikan yang masih menjadi masalah di Kabupaten Klaten antara lain masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar tapi tidak sekolah, belum semua kualitas sarana prasarana pendidikan PAUD dan pendidikan dasar dalam kondisi baik, masih rendahnya kualitas siswa pendidikan formal dan non formal. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan antara lain masih kurangnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, angka kematian ibu, bayi dan balita yang masih

cukup tinggi, belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Oleh karena itu, pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

d. Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis, walaupun angka kemiskinan dari tahu ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 14,15% turun menjadi angka 12,96% pada tahun 2018 (masih di bawah rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 11,32% dan juga angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,82%).

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan antara lain karena ketidakmampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasar karena tingkat pendapatan yang masih rendah, rendahnya kualitas angkatan kerja di dalam persaingan kerja sehingga belum memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Upaya mengentaskan kemiskinan harus mengedepankan program yang berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

e. Penanganan Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur daerah menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian dan menarik minat investor untuk berinvestasi salah satunya adanya infrastruktur yang baik. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan Instruksi Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% APBN/APBD untuk sektor infrastruktur.

f. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

Isu lingkungan hidup yang dihadapi antara lain pencemaran dan kerusakan lingkungan, kurang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, dan kurangnya ruang terbuka hijau.

Selain lingkungan hidup, bencana alam juga perlu dijadikan prioritas, mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di banyak daerah di Indonesia. Pada dasarnya, bencana alam memiliki keterkaitan erat dengan kondisi, pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kerawanan terhadap bencana yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti erupsi gunung merapi, banjir, tanah longsor dan angin ribut, yang jika tidak dilakukan mitigasi



bencana, akan menimbulkan banyak jatuh korban jiwa dan juga harta benda. Oleh karena isu lingkungan hidup dan tanggap bencana merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut kelangsungan kehidupan manusia. Terakhir permasalahan *Covid-19* dengan angka ikutan Pandemi, serta upaya penanganannya dengan *New-Normal* membuat penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan kondisi.



BAB II PERENCANAAN



2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *"Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur"*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: *"Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"*.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: *"Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya"*.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
2.1 Rencana Strategis
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019
2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Tahun 2019

visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

- Pertama* : **Redi – tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.
- Kedua* : **Jiwan – danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.
- Ketiga* : **Lir – ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.
- Keempat* : **Pitraya – inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.
- Kelima* : **Andaya – wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa "ewuh pakewuh" tetapi fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
- Keenam* : **Surya – sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.
- Ketujuh* : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.
- Kedelapan* : **Traju – tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten

Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya Saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.
Sasaran 1: Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

Tujuan 2: Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.



- Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan.
- Sasaran 2: Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)
- Sasaran 3: Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.
- Tujuan 3: Menurunkan tingkat kemiskinan.
- Sasaran 1: Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.
- Tujuan 4: Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk.
- Sasaran 1: Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*).
- Tujuan 5: Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.
- Sasaran 1: Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- Sasaran 2: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.
- Tujuan 6: Meningkatkan minat baca masyarakat.
- Sasaran 1: Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Misi 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- Sasaran 1: Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- Sasaran 2: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.
- Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- Tujuan 2: Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah
- Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola arsip SKPD.
- Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa



- Sasaran 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel
- Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah.
- Sasaran 3: Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM .
- Sasaran 4: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran 5: Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
- Sasaran 6: Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Sasaran 7: Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian.
- Sasaran 8: Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat.

Misi 3

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;

Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat.
- Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Tujuan 2: Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa.
- Sasaran 1: Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan.
- Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Sasaran 1: Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.
- Sasaran 2: Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- Sasaran 3: Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.



Sasaran 4: Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal.

Tujuan 4: Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

Sasaran 1: Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan.

Sasaran 2: Meningkatkan perlindungan sektor ketenagakerjaan.

Tujuan 5: Meningkatkan daya saing produk industri daerah.

Sasaran 1: Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

Misi 4

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Kebutuhan Sarana Prasarana Dasar Sosial Masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan.

Sasaran 3: Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.

Sasaran 1: Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang.

Sasaran 2: Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 2: Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran 1: Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.



Misi 6

Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tatahan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan.

Sasaran 1: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

Tujuan 2: Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya.

Tujuan 3: Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sasaran 1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 7

Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Misi 8

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan.

Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sasaran 3: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Sasaran 1: Pengembangan ketransmigrasian.



Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian , Angka Kesakitan dan Kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu
		2.2	Angka Kematian Bayi
		2.3	Angka kematian Balita
		2.4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)
3	Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat Dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		5.2	Persentase Penguatan Kapasitas PSKS
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
9	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN
10	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	10.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu
12	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan
13	Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku
14	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	14.1	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel
15	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15.1	Level Maturitas SPIP
		15.2	Level Kapabilitas APIP
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
17	Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan Serta Bantuan Hukum dan HAM	17.1	Persentase Tercapainya Penyusunan
		17.2	Produk Hukum dan Penanganan Perkara
18	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
19	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel	19.1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi
20	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	20.1	Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah
		20.2	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
		20.3	Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah
21	Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY
22	Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	22.1	Persentase Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		26.2	Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing
27	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	27.1	Prosentase Inovasi yang Diterapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
28	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal	28.1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)
		28.2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio Penduduk yang Bekerja
		29.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
30	Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan	30.1	Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
31	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
		31.2	Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks Layanan Infrastruktur
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan
34	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
35	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang	35.1	Ketaatan Terhadap RTRW
36	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	36.1	Indeks Kualitas Air
		36.2	Indeks Kualitas Udara
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)
37	Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)
40	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat
41	Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
42	Meningkanya Kualitas Layanan Perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
44	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
45	Pengembangan Ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni *Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing* dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

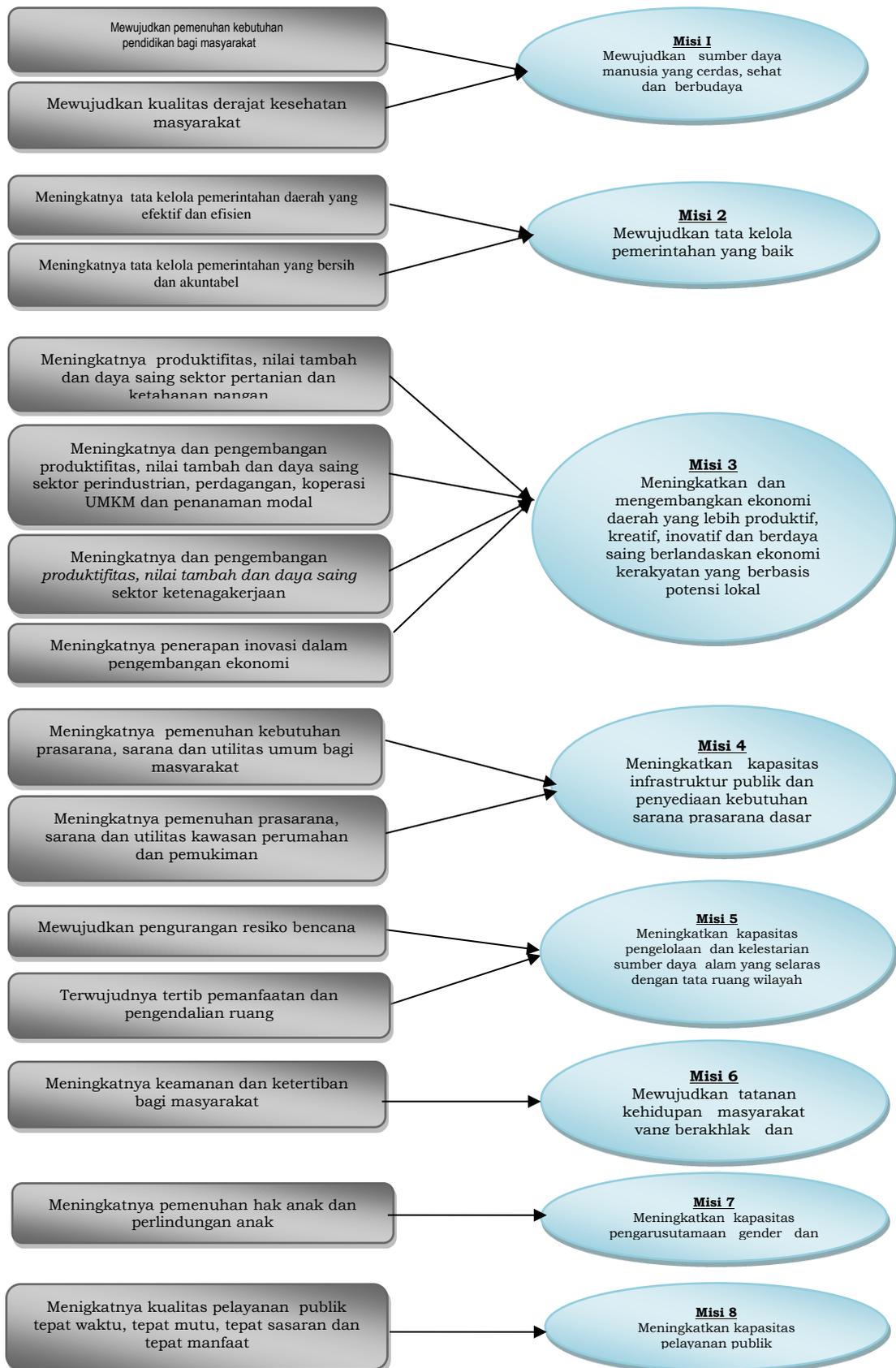
Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.



Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya. Sedangkan korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah disajikan pada Diagram 2.2.

Diagran 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah



2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	52
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	90
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	15
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,09
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,63
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,71
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,12
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	99
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	53
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	98
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	98
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	50
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	13
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	86,36
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	460
			PMA	%	294
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	2,5
			PMA	%	2,55
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,07
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	38,96
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	74,05
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,6
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	38,02
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	82,02
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	56,16
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	88
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	83
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,3
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	81,09
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	92,7
45	Pengembangan ketrasmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41,5

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	5
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	12
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	9
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4
5	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	2
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	4
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah	2

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
	daerah	
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	1
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	3
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	3
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	5
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	9
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	2
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	1
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	1
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	5
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	0
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	3
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	12
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	2
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	3
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	6
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	2
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	2
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	1
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	2
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	5
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	4
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan	8

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
	permukiman	
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	3
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	6
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	4
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	2
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	3
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	5
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	4
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	1
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	0
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	1
45	Pengembangan ketransmigrasian	2
Jumlah		162



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabilitas Anggaran
3.4 Efisiensi Sumber Daya



Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	$\leq 99,9$	Tercapai (Tinggi)	
2	≥ 100	Tidak Tercapai (Sangat Rendah)	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.3.



Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	52	98,37	189,2
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	90	90,57	100,63
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	15	17	113,33
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,09	9,34	92,57
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,63	1,52	93,25
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,71	0,90	126,76
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) (3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,12	2,1	99,06
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,78	100,21
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87	98,4	113,10
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	99	96	96,97
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13	12,35	95,00
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	55,71	5571
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	8,26	165,2
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	-75	-1250
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	100	1000
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-15,13	-302,55
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	133,33
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	83,33	92,59
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola	13.1	Prosentase kenaikan SKPD	%	5	8,72	174,4



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	arsip SKPD		mengelola arsip secara baku				
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	87	88	101
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)	61,32 (B)	90,18
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05	3,21	105,25
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	90	100
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	95,7	119,63
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	97	107,78
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	99,42	101,45
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	98	98,61	100,62
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	98	98,89	100,91
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	1,38	39,43
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4	10,57	85,24
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	50	42	84,00
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	-55,88	-223,53
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37	19,98	103,15



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
	saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	13	11,8	90,77	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	86,36	85	98,8	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	460	3	0,65	
			PMA	%	294	12	4,08	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	2,5	-79	-3160,00	
			PMA	%	2,55	-59	-2313,73	
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,07	0,96	89,72	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	98,79	143,17	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2	43,12	48,89	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	37,00	105,11	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5	3,54	47,2	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	38,96	60,87	156,24	
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	69,83	121,40	
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,05	74,05	100	
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,6	79,6	100	
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,02	36,16	95,11	
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,02	76,82	93,68	
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	56,16	42,54	75,75	
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	80	77,22	96,53	
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	83	61	73,49	
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	99	98	98,99	
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,3	72,35	119,98	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	perempuan dan anak	41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67
42	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,09	79,95	98,59
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	81,60	102,00
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	92,7	81,6	88,03
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	41,5	5,2	12,53

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh enam*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- b. Sebanyak 7 (*tujuh*) atau sebanyak 10,45% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- c. Sebanyak 1 (*satu*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 1,49% dengan kriteria ***Sedang***; dan
- e. Sebanyak 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 14,93% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Tinggi*** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:
 1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
 6. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 7. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 8. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;



10. Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
 11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
 12. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 13. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
 14. Level Maturitas SPIP;
 15. Level Kapabilitas APIP;
 16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 17. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 18. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
 19. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 20. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
 21. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;
 22. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
 23. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
 24. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
 25. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
 26. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
 27. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
 28. Prosentase inovasi yang diterapkan;
 29. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
 30. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 31. Indeks Layanan Infrastruktur;
 32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
 33. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 34. Ketaatan terhadap RTRW;
 35. Indeks Kualitas Air;
 36. Indeks Kualitas Udara;
 37. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 38. Indeks Demokrasi;
 39. Indeks Ketertiban Masyarakat;
 40. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 41. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan; dan
 42. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan *Kriteria Tinggi*, atau interval nilai realisasi kinerja $75,1 \leq 90$ sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 10,45%, diantaranya:
1. Indeks Profesionalitas ASN;
 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
 3. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
 4. Rasio penduduk yang bekerja;



5. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
 6. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA); dan
 7. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan *Kriteria Sedang*, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 1 (*satu*) indikator atau 1,49%, yaitu: Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan).
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Sangat Rendah*, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 10 (sepuluh) indikator atau 14,93%, diantara:
1. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;
 2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
 3. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
 4. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 5. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;
 6. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
 7. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
 8. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan; dan
 9. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.
 10. Persentase IKM yang memiliki daya saing;

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja* sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

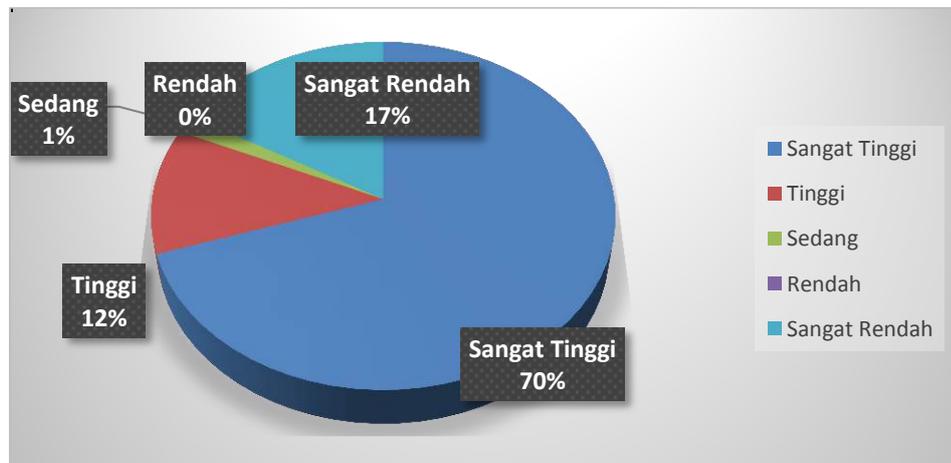


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 5 (*lima*) indikator, atau 7,46%, diantaranya:

1. Angka Kematian Bayi;
2. Angka Kematian Balita;
3. Tingkat Inflasi YoY;
4. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR; dan
5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 2 (*dua*) indikator atau 2,99%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu; dan
2. Prevalensi gizi buruk (BB/U).

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif* maka diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.2.

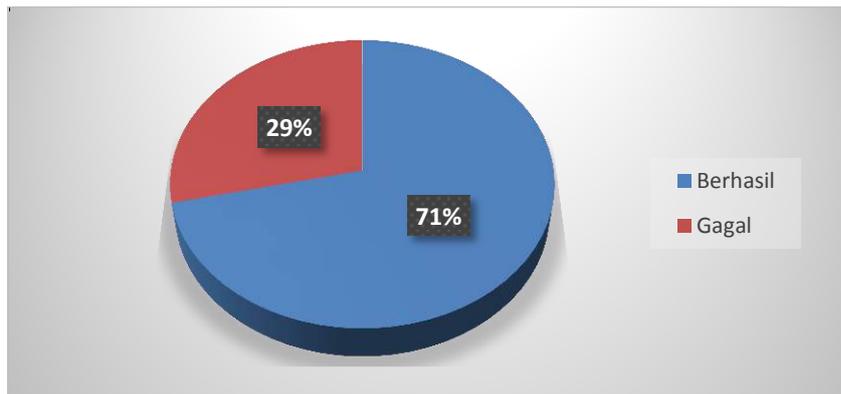


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.



Memedomani ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2020 didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2020 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun capaian sasaran: [Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal](#) sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	61,05	98,28	52	98,37	189,2	55	178,85
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	82,00	85,09	90	90,57	100,63	95	95,40

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

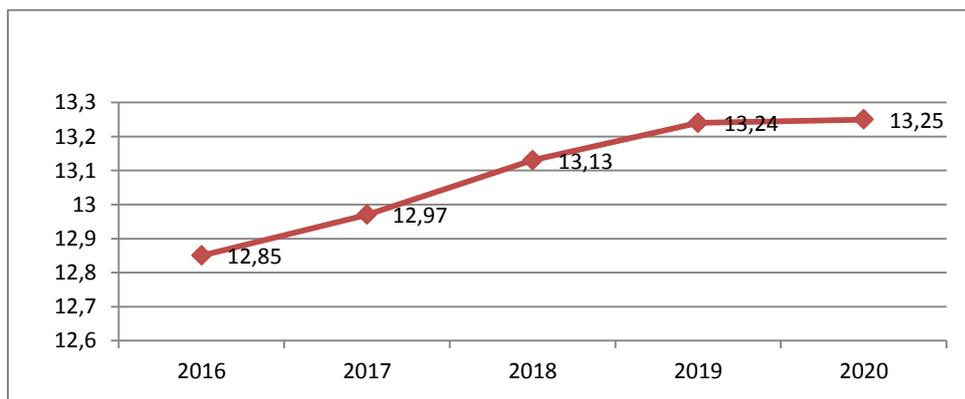


Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, pada tahun 2020 dengan indikator persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (dengan catatan jumlah sekolah dasar sebanyak 738 sekolah, dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 726 sekolah), dan indikator persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (dengan catatan jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 116 sekolah, dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 105 sekolah).

Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020, yaitu dari sebesar 12,85 pada tahun 2016 menjadi sebesar 13,25 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.1.



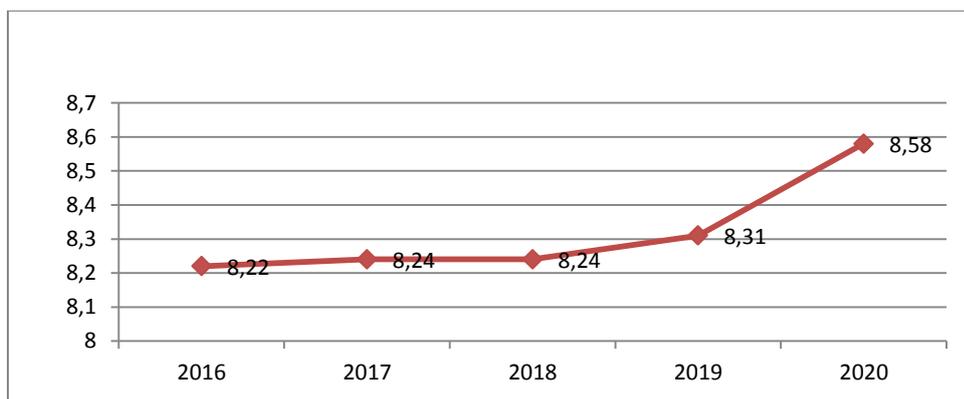
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021. Up Date Terakhir 18 Desember 2020.

Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Klaten Tahun 2016-2020

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020, yaitu dari sebesar 8,22 pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,58 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.2.





Sumber: Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021. Up Date Terakhir 18 Desember 2020.
 Grafik 3.2. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,27% dari sebesar 8,31 pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,58 pada tahun 2020, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 94,53%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2020 naik menjadi 96,02%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,58% pada tahun 2015, dan pada Tahun 2020 menjadi 100,48%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
 di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
 Tahun 2016-2020

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	105,23	97,57	81,00
2	2017	97,45	90,93	-
3	2018	102,75	95,21	-
4	2019	98,66	98,46	-



No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	2020	96,02	100,48	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 Urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2019 sudah mencapai 88,37%, naik menjadi 88,54% pada tahun 2020. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2018 mencapai 64,07% menjadi 71,14% pada tahun 2020 hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	91,26	72,77
2	2017	86,84	68,22
3	2018	90,84	64,07
4	2019	88,37	73,14
5	2020	88,54	71,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.



Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

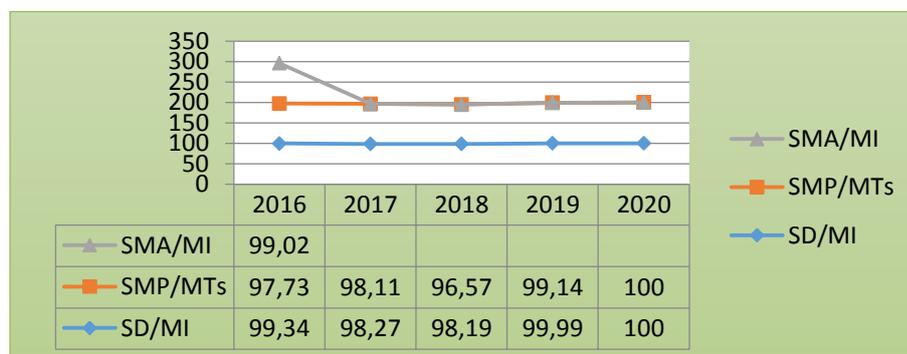
Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,08	0,23	0,18	0,13	0,08
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA	%	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah dua tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2017 sebesar 0,04% menjadi 0,01% di tahun 2020. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS bersifat fluktuatif, dari 0,08% pada tahun 2016 menjadi 0,23% pada tahun 2017, dan secara berangsur-angsur mulai tahun 2018 turun, terakhir pada tahun 2020 menjadi 0,08%. Begitu juga dengan Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA menunjukkan trend penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan dasar sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.3.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020

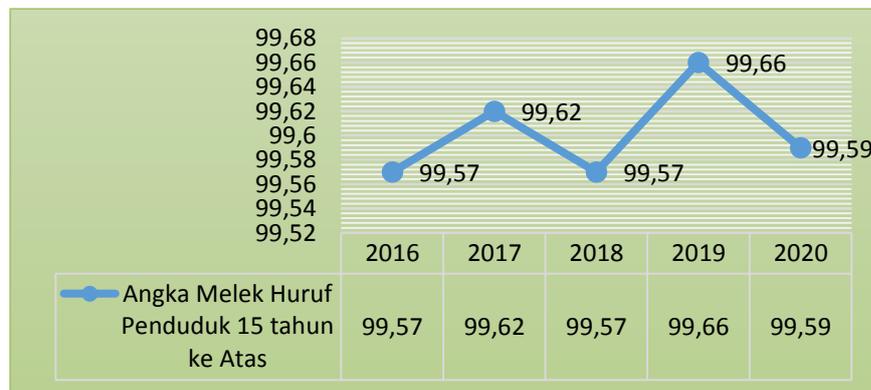
Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/Mi mengalami kenaikan di dua tahun terakhir yaitu 99,99% di tahun 2019 naik menjadi 100% di tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 97,73 % di tahun 2016 naik menjadi 100% pada tahun 2020.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.4.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Grafik 3.4. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,57 % di tahun 2018 menjadi 99,59 % di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.



Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	81,99	84,16	87,67	90,32	85,63
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	91,51	60,33	91,98	94,17	94,50
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	97,06	Na	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	98,76	98,27	99,00	99,19	99,60
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	96,78	93,55	96,92	97,10	98,52
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	97,53	Na	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi..

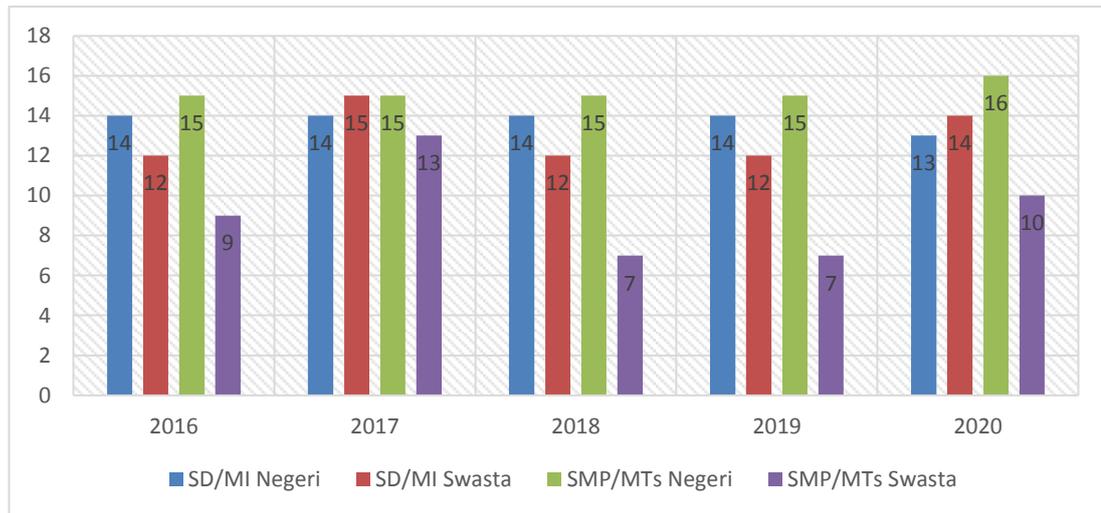
Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,08% pada tahun 2015 menjadi 99,19% di tahun 2019, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 96,58% pada tahun 2015 menjadi 97,10% pada tahun 2019. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini



menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Grafik 3.5. Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2016-2020.

Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15*) pada tahun 2016 angkanya relatif stabil hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri menjadi 1:13 dan untuk jenjang SMP/MTs Negeri menjadi 1:16. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta dari tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolah yang diminati.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka Melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.10.



Tabel 3.10.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	98,87	99,26	99,30	96,70	99,90
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	92,43	88,28	95,48	97,73	92,60

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87
Sekolah pendidikan SMP/MTS	%	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.11. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.



Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Non Formal;
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan:

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak;
- b. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan;
- c. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan belum tuntasnya *regrouping* Sekolah Dasar; dan
- d. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- c. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- d. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;



Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.



Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian,
Angka Kesakitan dan Kecacatan

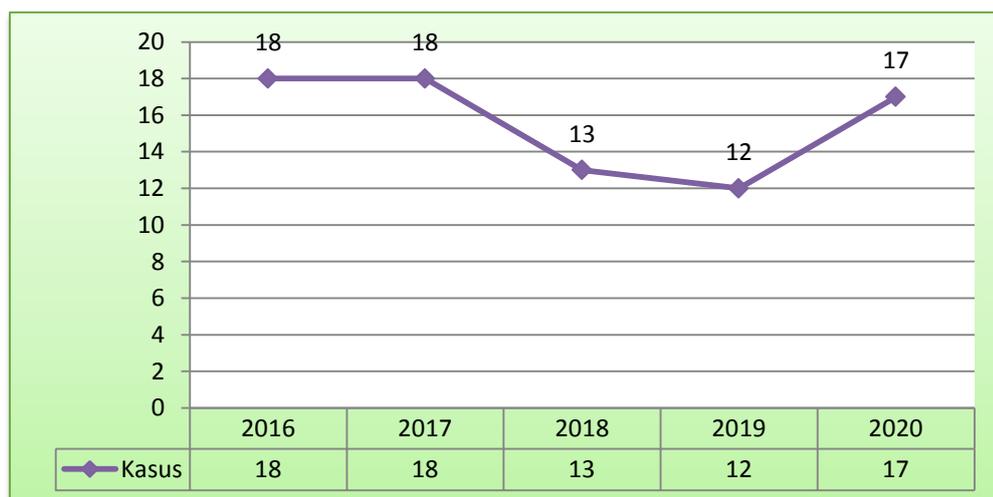
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	13	12	15	17	113,33	14	121,43
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,7	10,01	10,09	9,34	92,57	10,07	92,75
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,9	1,59	1,63	1,52	93,25	1,61	94,41
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,56	0,71	0,71	0,90	126,76	0,70	128,57

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada Grafik 3.6.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Grafik 3.6. Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2016-2020 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prambanan	Prambanan	0	0	2	0	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	1	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	0	0	1
3	Wedi	Wedi	3	0	1	0	0
4	Bayat	Bayat	0	1	1	0	0
5	Cawas	Cawas I	0	2	1	0	0
		Cawas II	0	1	1	0	0
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	0	0	0
		Trucuk II	0	1	0	1	1
7	Kalikotes	Kalikotes	1	0	0	0	1
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	1	0	2	1
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	1	0	1	0	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	1	0	0	1
12	Ngawen	Ngawen	0	0	0	1	0
13	Ceper	Ceper	0	2	0	1	1
		Jambukulon	1	0	0	0	0
14	Pedan	Pedan	0	0	1	1	1
15	Karangdowo	Karangdowo	1	1	1	0	2
16	Juwiring	Juwiring	3	0	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	1	1	0	1
		Wonosari II	1	0	0	2	0
18	Delanggu	Delanggu	1	1	0	0	3
19	Polanharjo	Polanharjo	0	0	1	1	0
20	Karanganom	Karanganom	0	2	1	0	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	1	0	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	1	1	0
		Kayumas	1	0	0	0	1
23	Kemalang	Kemalang	0	2	0	0	1
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	2
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	0	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	0	1	0
Jumlah			18	18	13	12	17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

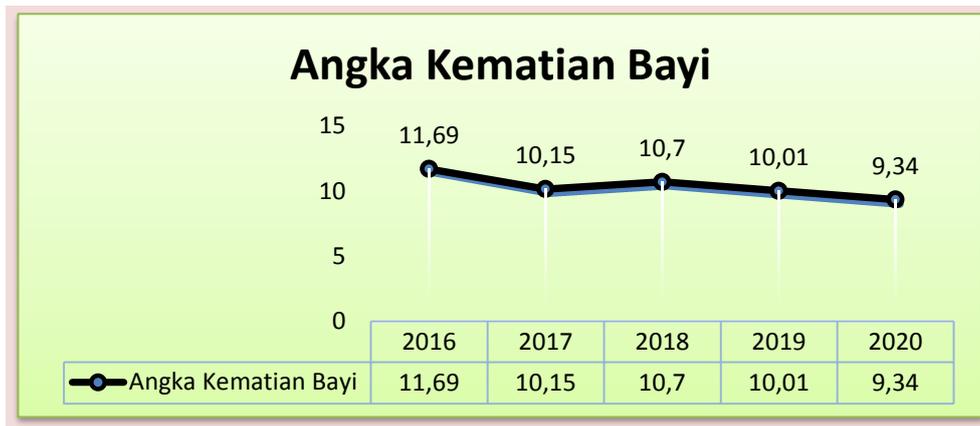
Berdasarkan Tabel 3.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah



satunya karena hipertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.7.



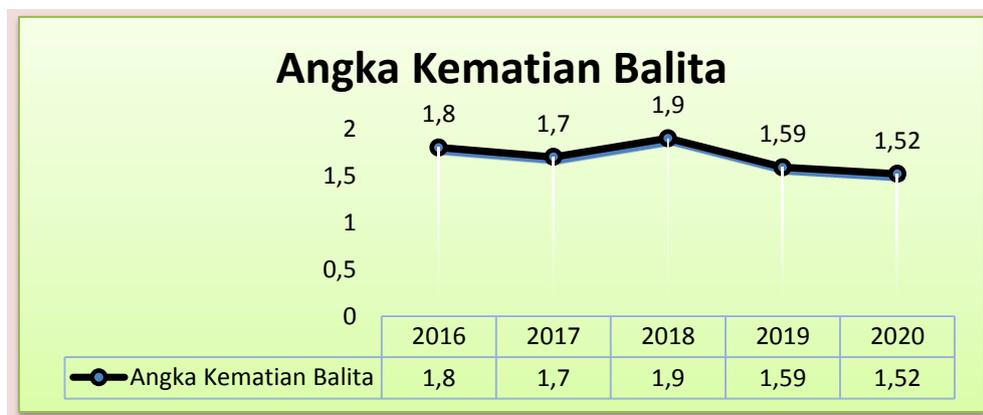
Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Grafik 3.7. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.

3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.8.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Grafik 3.8. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

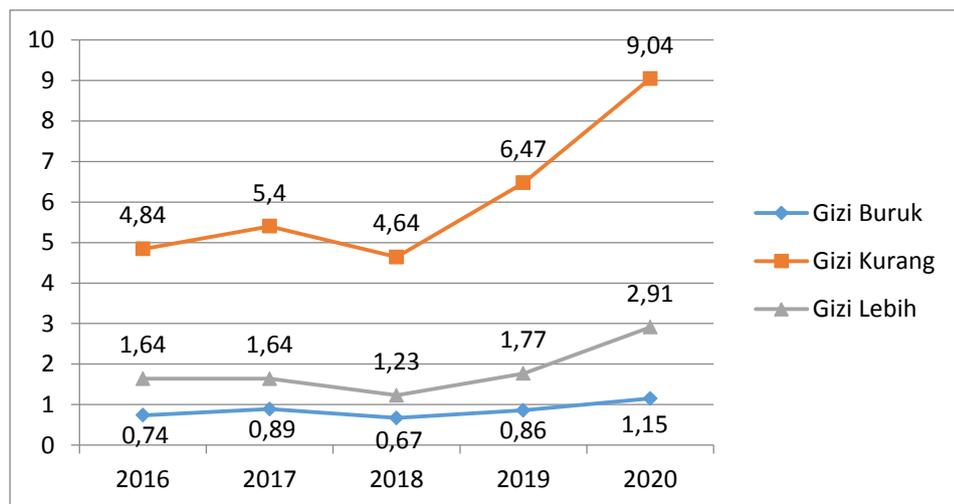


Berdasarkan Grafik 3.8. sebagaimana tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2016 sebanyak 1,8 per 1.000 KH (atau 32 kasus), tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus), dan tahun 2020 menjadi sebanyak 1,52 per 1.000 KH (atau 24 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.9.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Grafik 3.9. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 3.9. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2016-2020 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif, dan Kecamatan yang perlu mendapat perhatian (survalen) diantaranya: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:



1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan:

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- b. Masih ditemui adanya: Angka kesakitan demam berdarah, penemuan infeksi HIV dan AIDS yang setiap tahun cenderung meningkat, adanya ancaman pandemik flu burung, penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis, serta penanganan pandemi *Covid-19*;
- c. Beberapa jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) masih terjadi. Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI;
- d. Kondisi gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan



- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran *Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate);*



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: *Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)* sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) /TFR	2,2	1,91	2,1	2,12	2,1	99,06	2,1	100

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2019 sebanyak 15.681 KH, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 37.376 KH (atau turun/naik 58,05% dibanding tahun 2019). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2019 sebanyak 12.503 peserta KB baru, dan pada tahun 2020 menjadi 12.348 peserta KB baru (atau turun 1,26%). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur

dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315
2020	195.133	12.348	138.344

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap pasangan usia subur pada tahun 2019 sebesar 6,32%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,85%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 71,39%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pasangan subur menjadi 195.133 PUS, jumlah peserta KB Baru sebanyak 12.348 orang, dan jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 138.344 orang.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.775 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 82.267 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	9.233	3.103	13.761
02 Gantiwarno	2.110	8.356	2.275	12.741
03 Wedi	1.666	11.062	3.680	16.408
04 Bayat	5.643	8.412	3.184	17.239



Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05 Cawas	2.689	12.152	4.028	18.869
06 Trucuk	4.728	13.413	4.339	22.480
07 Kalikotes	894	6.806	2.402	10.102
08 Kebonharum	369	3.946	1.203	5.518
09 Jogonalan	1.812	10.835	3.520	16.167
10 Manisrenggo	1.751	7.922	3.490	13.163
11 Karangnongko	2.002	7.311	2.116	11.429
12 Ngawen	1.168	9.239	4.163	14.570
13 Ceper	1.222	14.078	5.268	20.568
14 Pedan	1.394	9.534	3.433	14.361
15 Karangdowo	3.135	9.060	2.603	14.798
16 Juwiring	1.740	10.019	3.783	15.542
17 Wonosari	2.956	10.206	3.682	16.844
18 Delanggu	475	7.938	2.811	11.224
19 Polanharjo	1.142	8.421	2.774	12.337
20 Karanganom	1.343	9.444	3.305	14.092
21 Tulung	2.588	9.628	2.987	15.203
22 Jatinom	4.128	8.631	3.170	15.929
23 Kemalang	3.239	6.341	2.468	12.048
24 Klaten Selatan	1.142	8.445	2.889	12.476
25 Klaten Tengah	945	8.325	2.426	11.696
26 Klaten Utara	1.016	8.998	3.165	13.179
2020	52.722	237.755	82.267	372.744
2019	52.682	237.828	81.747	372.261
2018	52.688	238.374	81.688	372.750
2017	80.935	192.994	114.736	388.665
2016	67.400	239.583	83.239	390.222

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.16. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.682 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.828 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 81.747 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.775 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 82.267 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka



kelahiran. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)*, diantaranya:

1. Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;
5. Pelayanan Kontrasepsi;
6. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
7. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
8. Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
9. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Permasalahan:

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan Usia Subur.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran *Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;*



Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit sebagaimana Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

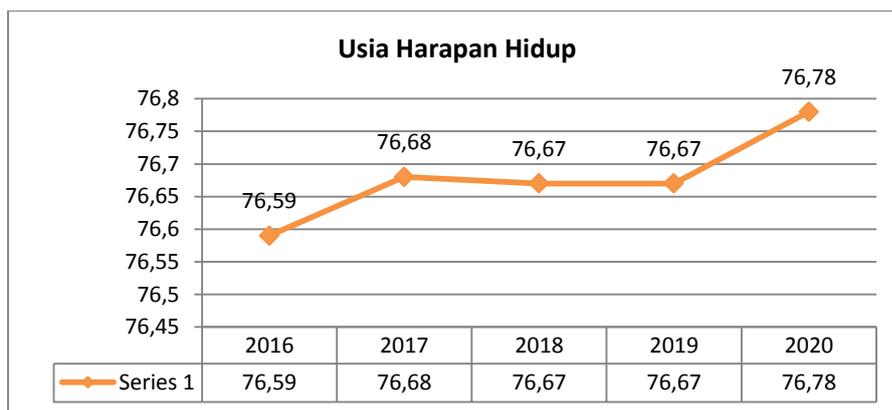
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya oleh Masyarakat dan
Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,77	76,67	76,62	76,78	100,21	76,62	100,21

Sumber: BPS, 2021 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2016-2020 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 3.10.



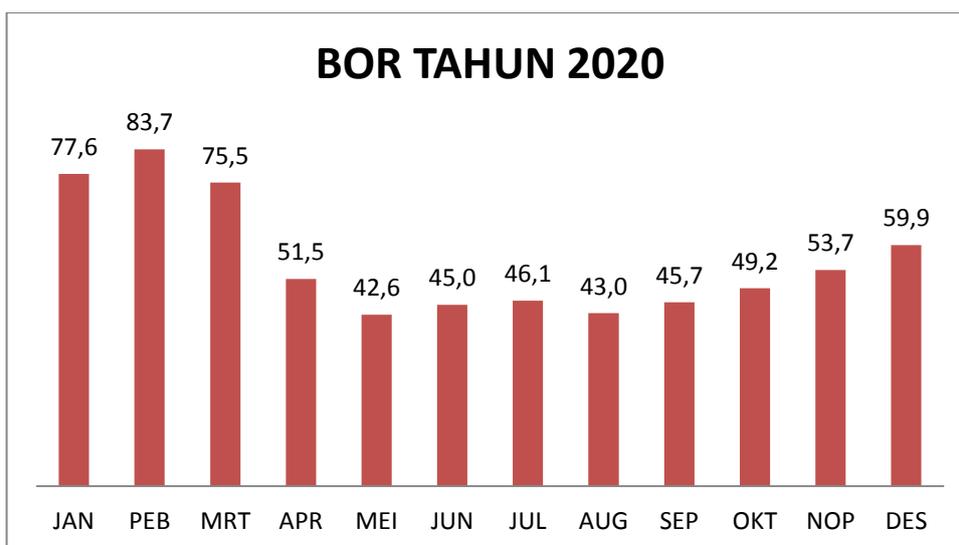


Sumber : BPS, 2021. Update Terakhir 18 Desember 2020.

Grafik 3.10. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

1) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2020 adalah 56,9 % dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.11.



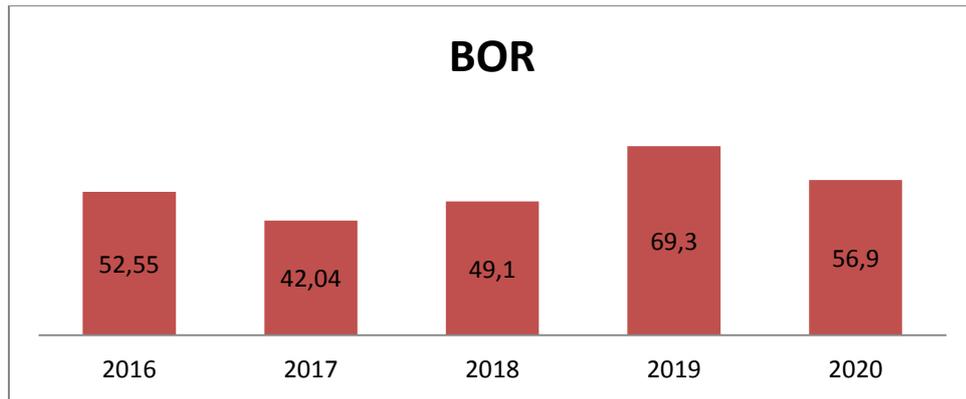
Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2021

Grafik 3.11. Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Disamping perkembangan Indikator BOR sebagaimana tersebut di atas, jumlah kunjungan pasien pada tahun tercatat sebanyak 110.810 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 8305 orang/Tahun (atau rata-rata 23 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 90.627 orang/Tahun (atau rata-rata 248 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 11.878 orang/Tahun (atau rata-rata 33 orang/hari).

Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.12.





Sumber : RSUD Bagaswaras, 2021

Grafik 3.12. Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).

Berdasar pada Grafik 3.11. dan Grafik 3.12. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi Penurunan Persentase Pemakaian Tempat Tidur dibanding Tahun 2019 sebesar 12,4.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahasakitan Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; dan
2. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan.

Permasalahan:

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - a. Demam berdarah dengue .
 - b. Malaria
 - Filariatis
2. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare



- d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
- e. HIV
- f. Kejadian luar biasa KIPI
- g. Pencegahan Stunting
- h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil

5. Sasaran *Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;*



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran *Tata Kelola Pemerintahan Daerah* yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS* dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.18.

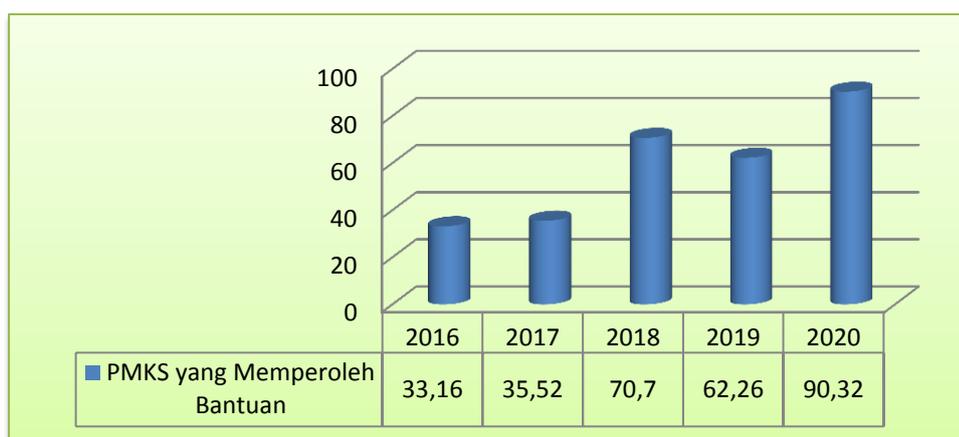
Tabel 3.18.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS
dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	70,66	62,26	87	98,4	113,10	89	110,56
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	99	96	96,97	100	96,00
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	14,32	13,09	13	12,35	95,00	12,9	95,74

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2016–2020 disajikan pada Grafik 3.13.



Sumber: Dinas Sosial P3A dan KB, 2021.

Grafik 3.13. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016–2020

Berdasarkan Grafik 3.13 sebagaimana tersebut di atas dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan yang drastis kemudian menurun menjadi 62,26% di tahun 2019, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 menjadi 90,32%. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi selama tahun 2020 menjadi sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [*Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM*](#), diantaranya:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan



4. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit Lainnya).

Permasalahan:

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
- b. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- c. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain; dan
- d. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial;
- c. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

6. Sasaran *Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;*



Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi:

- (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
- (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;
- (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan;
- (d) Organisasi Pemuda Partai Politik;
- (e) Organisasi Kemahasiswaan;
- (f) Praja Muda Karana (Pramuka);
- (g) Organisasi Siswa Intra



Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi 37 berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	12	10	55,71	557,1	60	92,85
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	5	8,26	165,2	30	27,53

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.19. sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah prestasi pemuda sebanyak 31 penghargaan, dan pada tahun 2020 bertambah menjadi sebanyak 70 penghargaan. Sedangkan jumlah prestasi olahraga pada tahun 2019 sebanyak 111 penghargaan, dan pada tahun 2020 mendapat 121 penghargaan.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas belum banyak. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga belum optimal. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada (2) dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang	Cabang	31	31	31	31	31



No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	olahraga						
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	29	29	29	29	25
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	35	35	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga](#), diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
3. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; dan
5. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Permasalahan:

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Program kepemudaan pemerintah kurang menyentuh kebutuhan usia produktif;
- b. Jiwa kewirausahaan pemuda masih rendah; dan
- c. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.



7. Sasaran *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.*



Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya* sebagaimana Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	3,2	12	6	-75	-1250	6	-1250
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	14,3	5	10	100	1000	10	1000

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2016-2020 dapat disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya



di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	28	7
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2021.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMIL, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2016-2020 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	buah	0	0	0	0	34

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.23. sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari



Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya*. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya;
3. Pengelolaan Keragaman Budaya: dan
4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara dengan baik akan mengakibatkan *culture lag* (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa;
- b. Terbatasnya pengetahuan tentang sejarah, seni budaya dan tradisi sehingga penerapan nilai luhur budaya Jawa semakin berkurang;
- c. Belum terwadahnya para pelaku/pekerja seni dalam berekspresi mementaskan hasil karyanya;
- d. Belum ditetapkannya icon seni budaya asli Kabupaten Klaten;
- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cagar budaya; dan
- f. Banyak benda yang diduga sebagai cagar budaya yang belum teridentifikasi untuk dilestarikan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.



8. Sasaran *Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;*



U*paya Pemerintah Kabupaten* dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan* disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	65,79	22,19	5	-15,13	-302,6	5	-302,55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021.

Pada Tahun 2020 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk *merolling* buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat baca masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	43.979	44.687	45.362	49.786	49.786
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	40.003	41.225	68.346	83.511	70.878

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.25. sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 sebanyak 83.511 orang, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 70.878 orang (atau turun -15,13%). Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19, dimana perpustakaan keliling dan kegiatan *car free day* tidak bisa operasional kegiatan, padahal dari sini biasanya masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan perpustakaan. Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2016	44
2	2017	45
3	2018	45
4	2019	45
5	2020	45

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.26. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: [Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan](#) dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.



Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

- a. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
- b. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku; dan
- c. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif.

9. Sasaran *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;*

Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien tercermin ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan terlihat sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah* sebagaimana Tabel 3.27.

Tabel 3.27.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	74	77,55	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2021.

*) Catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.

Tuntutan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12,1	36,05	25	4,91	78,06

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.28. di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2020 nilai IPP mencapai 78,06 dengan (kategori tinggi). Indeks Profesionalitas ASN ini ditunjang dari unsur:

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9877 orang, dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang dengan perincian yang berpendidikan: a)



Jenjang SD/MI sebanyak 53 orang (atau 0,59%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 202 orang (atau 2,25%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.339 orang (atau 14,89%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.403 orang (atau 15,61%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.443 orang (atau 60,55%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 550 orang (atau 6,12%).

- b. Kompetensi Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 36% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 4,78%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang, yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 20 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 550 orang (atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan Bintek hanya berkisar 56,4%). Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

- c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 25% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

- d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 (sepuluh) ASN, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus pelanggaran disiplin.



Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk sasaran strategis: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan:

- a. Belum semua Pejabat Struktural mengikuti Diklat Struktural sesuai jenjangnya untuk tahun 2020 tidak ada pengiriman Diklatpim (Diklat Struktural) karena adanya pandemic Covid-19;
- b. Belum terisinya seluruh kotak jabatan (13%);
- c. Masih dalam kategori sedang nilai IP ASN (78,06);
- d. Belum optimalnya update data Kepegawaian (20%); dan
- e. Belum optimalnya pengembangan aparatur (4%).

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran *Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;*



Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri

atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.29.

Tabel 3.29.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WDP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WDP (3)	WTP (4)	133,33	WTP (4)	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021.

Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*), kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2018 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2015–2019

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2015	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> pengendalian rekening



Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2020 In Proses.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.30. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020, dengan penguatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- b. Penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten belum lengkap atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan



- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;*



Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD* tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	93,10	91,31)	90	88,33	92,59	90	98,14

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.31. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 12 Raperda, dari 13 Raperda yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 5 Raperda, dari 6 Raperda yang direncanakan.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dalam mendukung pencapaian jangka menengah Daerah diukur dari jumlah Keputusan DPRD selama tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel 3.32.



Tabel 3.32.
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perda	8	18	28	15	6
2	Keputusan DPRD	50	38	49	39	21
3	Keputusan Pimpinan DPRD	17	18	9	4	2
4	Keputusan Badan Anggaran	8	6	6	7	7
5	Keputusan Badan Musyawarah	16	12	13	13	13
	Jumlah	99	92	105	78	50

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.32. Sebagaimana di atas, hasil pengukuran kinerja terhadap indikator jenis dan jumlah keputusan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, mulai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan jumlah produk keputusan yang dihasilkan, misalnya: Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 28 Perda, dan tahun 2020 hanya 7 Perda, 2. Keputusan DPRD pada tahun 2018 sebanyak 49 produk, dan tahun 2020 sebanyak 21 Keputusan DPRD, 3. Keputusan Pimpinan DPRD pada tahun 2018 sebanyak 9 produk, dan tahun 2020 sebanyak 2 Keputusan Pimpinan DPRD, 4. Keputusan Badan Anggaran dan Keputusan Badan Musyawarah relatif stabil.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: [Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD](#) pada tahun 2020, dengan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.

Permasalahan:

- a. Belum semua ASN mengikuti Diklat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kerjanya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.



12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah* sebagaimana Tabel 3.33.

Tabel 3.33.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	71	100	100	100	100	90	111,11

Sumber: Bappeda, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah* pada tahun 2020, yang didukung perlunya *perencanaan pembangunan Daerah* yang wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)



memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung *data dan informasi pelaksanaan pembangunan*.

Pada tahun 2020 untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah* didukung dengan program, diantaranya:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Perencanaan Sosial dan Budaya;
4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
5. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana;
- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja;
- c. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi; dan
- d. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung *base line data dan informasi pembangunan* yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: *Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*.



13. Sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD*;



Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD* disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	11,72	12,56	5	8,72	174,4	5	174,4

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah Daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebanyak 74.700 arsip, dan pada tahun 2020 sudah mencapai 120.417 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arsip	buah	74.700	78.434	87.625	98.635	120.417

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.35. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya

pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD* dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memanfaatkan *data dan informasi pelaksanaan pembangunan* yang terdokumentasikan/tersipkan. Pada tahun 2020 program untuk tercapainya sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD*, diantaranya:

1. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
3. Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan
- b. Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

14. Sasaran *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;*



Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang

profesional, transparan dan akuntabel. Adapun capaian sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	48	68	87	88	101	100	88

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Guna pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel langkah yang ditempuh adalah dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penetapan APBDes yang tepat waktu dan peningkatan pembinaan PKK. Adapun perkembangan persentase peningkatan kapasitas pemerintahan desa tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2016-2020

Tahun	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	Jumlah desa binaan PKK dalam satu Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	13	15	26
2017	35	31	39
2018	88,43	58,36	96,8
2019	75	59	66
2020	0	88	78

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

*) catatan: pada tahun 2020 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ditiadakan karena adanya refocusing untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan Tabel 3.37. sebagaimana tersebut di atas, kinerja penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan kinerja, dilihat dari cakupan jumlah desa sebanyak 391 desa dengan jumlah Perangkat Desa sebanyak 3.096 orang, dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2.703 orang.



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel* dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat pelaksanaan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelestarian kegiatan. Pada tahun 2020, program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel*, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Tata Kelola Pemerintah Desa; dan
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Permasalahan:

- a. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa;
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kualitas perangkat desa; dan
- e. Potensi PKK belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Solusi:

- a. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi; dan
- c. Peningkatan peran PKK dalam pengembangan potensi kawasan perdesaan.

15. Sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;*



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan

partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefite* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah](#) sebagaimana Tabel 3.38.

Tabel 3.38.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	60,33 (B)	61,32 (B)	68(B)	61,32 (B)	90,18	70 (B)	87,6

Sumber: Inspektorat dan Setda Bagian Organisasi, 2021.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem



Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern - ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;
3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2020 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil



penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 3.41.

Tabel 3.39.
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 3.39. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapainya Level 3, diantaranya:

- a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kompetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);
- b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko (*risk register*) OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.



Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 3.40.

Tabel 3.40.
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya *Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan *meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:



1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 61,32 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 20,79
 - Pengukuran kinerja nilai 15,16
 - Pelaporan kinerja nilai 10,21
 - Evaluasi kinerja nilai 5,03
 - Capaian kinerja nilai 10,14
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran



strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah.

Permasalahan:

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
- d. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi:

- a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
- b. Mensinergikan/mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan
- d. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mempertahankan opini WTP atas opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran *Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;*



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagaimana Tabel 3.41.

Tabel 3.41.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,09	3,22	3,05	3,21	105,25	3,1	103,55

Sumber: *Setda Bagian Pemerintahan, 2021.*

Catatan: *Kondisi capaian 2020 baru penilaian dari Provinsi, dari Depdagri belum keluar.*

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2020 dengan skor 3,21 tergolong sangat tinggi, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/*desk* dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.



- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;
4. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media;
6. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan;
7. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
8. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
9. Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Permasalahan:

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran *Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;*



Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM* sebagaimana Tabel 3.42.

Tabel 3.42.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	83	90	90	100	90	100
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	234	90	80	95,7	119,63	80	119,63

Sumber: Setda Bagian Hukum, 2021.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 63 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 13 Peraturan Daerah, dan 50 Peraturan Bupati, terealisasi sebanyak (12 Perda + 96 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6 perkara, dan terselesaikan sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 6 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 6 Peraturan Daerah, dan 73 Peraturan Bupati, terealisasi sebanyak (5 Perda + 73 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10 perkara, dan terselesaikan sebanyak 10 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara* di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk



sasaran strategis sasaran Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

- a. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
- b. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
- c. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: *yuridis, sosial dan filosofinya*.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran *Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;*



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	87,78	81	90	97	107,78	90	107,78

Sumber: Setda Bagian Pembangunan, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “Senenan” dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 81% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 97% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat.



19. Sasaran *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel*



Untuk mewujudkan sasaran *Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* sebagaimana Tabel 3.44.

Tabel 3.44.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 198 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 198 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 198, gagal lelang sebanyak 2, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 5 penunjukan langsung oleh OPD terkait. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 134 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 110, gagal lelang sebanyak 13 usulan, 11 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa).

Permasalahan:



Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran *Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;*



Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan* sebagaimana Tabel 3.45.

Tabel 3.45.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	88,14	98	98	99,42	101,45	90	110,47
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98,08	98	98	98,16	100,16	90	109,07
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	95	98	98	99,86	101,90	100	99,86

Sumber: Setda Bagian Humas, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam *Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*, pada tahun 2020, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah
Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1687 (atau 98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1710 (atau 99,42%).
2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
Pada tahun 2019 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2352 (98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 355 (atau 98,61%).
3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah
Pada tahun 2019 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 235 (atau 98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 445 (atau 98,99%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*, pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis didukung dengan program, diantaranya:

1. Kerjasama dengan Mass Media;
2. Pengembangan data/informasi/statistik Daerah;
3. Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
5. Peningkatan Persandian Daerah.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen *cerita historis Pemerintahan* baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.



21. Sasaran *Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;*



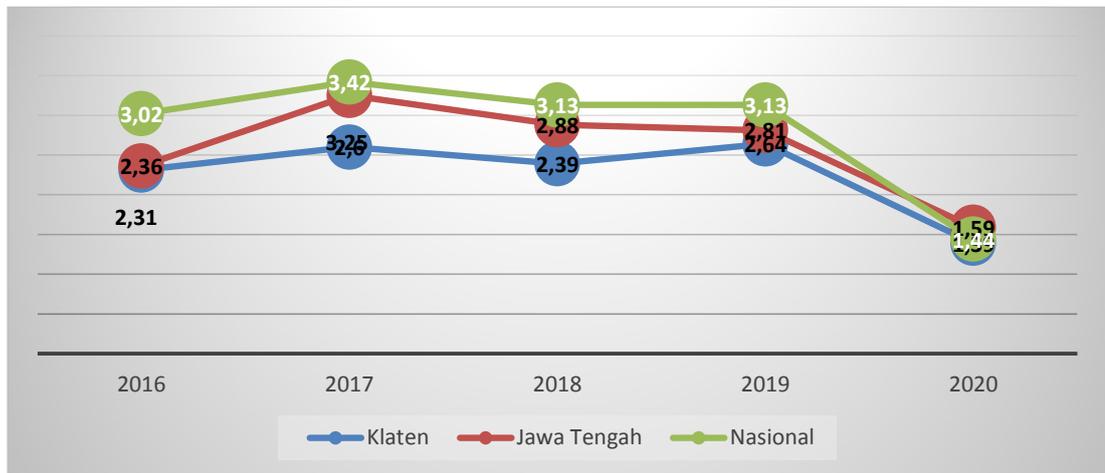
Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian* sebagaimana Tabel 3.46.

Tabel 3.46.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	2,39	2,64	3,5 (± 1)	1,38	39,43	3,5 (± 1)	39,43

Sumber: Setda Bagian Perekonomian, 2021.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 2,64%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,38%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.14.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2021. (Diolah).

Grafik 3.14. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Grafik 3.14. di atas, laju inflasi selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2020 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 1,44% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian* dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat "linier" tidak "given" atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.



22. Sasaran *Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;*



Untuk mewujudkan sasaran *Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat* sebagaimana Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	95	100	95	100

Sumber: Setda Bagian Kesra, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2020 jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesra yang direncanakan sebanyak 300 pemangku kepentingan, dan terealisasi sebanyak 285 (atau 95%). Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat* untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program, diantaranya:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Keagamaan; dan
3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.



Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;*



*P*angan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah* sebagaimana Tabel 3.48.

Tabel 3.48.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,4	10,57	85,24	12,6	83,89

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49.

Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut
Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	6,2401	4,8938	1,1598	0	0,1865	6,2401
2	Gantiwarno	0,3049	0,3049	0	0	0	0,3049
3	Wedi	1,2655	1,0455	0	0	0,2200	1,2655
4	Bayat	1,5360	1,5360	0	0	0	1,5360
5	Cawas	1,4323	1,0367	0	0	0,3956	1,4323
6	Trucuk	1,0909	0,8744	0,1965	0	0,0200	1,0909
7	Kalikotes	0,8770	0,8770	0	0	0	0,8770
8	Kebonarum	1,0576	1,0254	0,0322	0	0	1,0576
9	Jogonalan	3,0291	2,3517	0,6774	0	0	3,0291
10	Manisrenggo	0,5710	0,5710	0	0	0	0,5710
11	Karangnongko	0,2913	0,2913	0	0	0	0,2913
12	Ngawen	1,6694	1,6694	0	0	0	1,6694
13	Ceper	8,1483	3,0174	4,9491	0	0,1818	8,1483
14	Pedan	1,8115	1,7869	0,0246	0	0	1,8115

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Karangdowo	1,2128	1,2008	0	0	0,0120	1,2128
16	Juwiring	2,2360	1,6907	0,5453	0	0	2,2360
17	Wonosari	5,3325	4,0268	1,3057	0	0	5,3325
18	Delanggu	4,9686	4,8386	0,1300	0	0	4,9686
19	Polanharjo	1,3451	1,1936	0,0909	0,0606	0	1,3451
20	Karanganom	4,7212	4,0590	0,6622	0	0	4,7212
21	Tulung	1,3996	1,0666	0,3330	0	0	1,3996
22	Jatinom	1,7253	1,6935	0	0,0318	0	1,7253
23	Kemalang	25,4459	0,0220	0	25,4239	0	25,4459
24	Klaten Selatan	8,4121	8,4121	0	0	0	8,4121
25	Klaten Tengah	3,4641	3,2521	0	0	0,2120	3,4641
26	Klaten Utara	3,5921	3,3666	0,2255	0	0	3,5921
	2020	93,1802	56,1038	10,3322	25,5163	1,2279	93,1802

Sumber : DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)								
1	Padi	76.029	73.627	74.964	73.962	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916
2	Jagung	9.682	9.549	11.713	11.085	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087
3	Kedelai	1.935	1.523	2.562	2.234	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544
4	Kacang Tanah	1.224	1.067	955	909	1.224	1.067	955	909	855	876
5	Kacang Hijau	350	299	240	228	350	299	240	228	1978	1843
6	Ubi Kayu	822	685	435	395	822	685	435	395	1193	997
7	Ubi Jalar	24	20	26	21	24	20	26	21	27	25

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.



Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)								
1	Padi	426.028	57,87	380.268	51,41	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33
2	Jagung	72.583	74,97	90.343	81,50	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38
3	Kedelai	2.759	18,12	4.440	19,87	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12
4	Kacang Tanah	1.784	14,58	1.527	16,79	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21
5	Kacang Hijau	260	8,72	285	12,50	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77
6	Ubi Kayu	32.224	392,11	9.778	224,99	32.224	392,11	9.778	224,99	27.296	273,81
7	Ubi Jalar	356	143,55	251	119,28	356	143,55	251	119,28	333	134,77

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.50 dan Tabel 3.51 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52.
Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau Rajangan	2,193.575	1,233.527	1.147,27	1.750,30	1,558,79
2	Tembakau Asepan	1,038.530	1,070.724	1.037,05	2.595,30	2.308,72
3	Tembakau Vorstenland	303.930	239.455	135.535	55.144	-
4	Kelapa Dalam	4,097.630	4,697.582	3.976,64	4.048.189	4.322,36
5	Kelapa Hibrida	45.510	45.600	49.073	29.340	29,94
6	Kelapa Deres	99.470	98.740	87.149	87,15	78,84
7	Kopi Arabica	105.250	81.320	43,32	43.320	162,20
8	Kopi Robusta	9.830	9.990	9,82	9,82	12,94
9	Cengkeh	44.220	45.630	36,5	36,5	49,75
10	Lada	13.150	12.110	9,78	11,4	17,70
11	Tebu	6,289.000	3,258.940	3.258,9	3.316.970	3.202,97

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.



Berdasarkan Tabel 3.52. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53.
Populasi Ternak Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	88,343	88,850	100,259	102.431	104.312
2	Sapi Perah	5,795	6,098	6,284	6.433	6.807
3	Kambing	88,343	88,957	9,596	101.402	105.782
4	Domba	38,489	38,570	45,204	46.963	47.562
5	Ayam Bukan Ras	2,801,581	3,256,177	2,245,443	2.532.676	2.109.668
6	Ayam Pedaging	2,898,344	3,385,400	2,475,187	3.896.788	2.489.800
6	Ayam Petelur	867,822	930,234	746,422	832.764	900.342
7	Itik	395,436	575,100	425,473	430.329	397.012
8	Burung Puyuh	451,193	452,332	519,566	535.244	363.563

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.53. sebagaimana tersebut di atas, hal yang menjadi catatan khusus adalah penurunan jenis Ayam Bukan Ras dan Ayam Pedaging. Pada tahun 2019 jumlah Ayam Bukan Ras sebanyak 2.532.676 ekor, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 2.109.668 ekor (atau turun 16,70%), begitu juga dengan Ayam Pedaging, pada tahun 2019 sebanyak 3.896.788 ekor, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 2.489.800 ekor (atau turun 36,11%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam. Sedangkan produksi peternakan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54.
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2016-2020

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Susu (Liter)	4,878,662	5,903,181	4,266,718	4.978.442	4.456.373
2	Daging (Kg)	2,749,351	2,963,800	584,220	2.010.393	1.897.720
3	Telur (Butir)	375,376,131	570,571,719	130.992.000	154.784.416	154.567.112

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.54. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2016-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak. Sedangkan pada tahun 2020 produksi susu turun sebanyak 522.069 liter dibanding tahun 2019 (atau turun 10,49%), produksi daging turun sebanyak 112.673 kilogram dibanding tahun 2019 (atau turun 5,60%), dan produksi telur turun sebanyak 217.304 butir



dibanding tahun 2019 (atau turun 0,14%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah* pada tahun 2020 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Pengembangan Perikanan Tangkap;
5. Pengembangan Budidaya Perikanan;
6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
10. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
11. Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
12. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil - hasil pangan;
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk - produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program-program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani;



- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satuan Kerja (Satker) dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- j. Belum beragam tingkat konsumsi pangan; dan
- k. Menurunnya produktivitas perikanan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil - hasil pangan;
- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk - produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program - program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran *Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;*



*P*emerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa

yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan](#) disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam
Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	39	50	42	84,00	58	72,41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 226 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.

Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	70	41	3
2017	156	41	3
2018	246	41	3
2019	300	41	3
2020	357	41	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.



Berdasarkan Tabel 3.56. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel. 3.57.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmili ran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskombang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karangom, Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karangom, Kec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen	Karena refokusing tidak ada kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.
2.	Data Perkemban	1. Posyantek Kec.	1. Posyantek Kec. Karanganom	1. Posyantek antar desa	1. Posyantek antar desa	



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	gan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	(Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.57. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan



2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.
- 3.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan;



Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran: [Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan](#) sebagaimana Tabel 3.58.

Tabel 3.58.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	47,50	31,96	25	-55,88	-223,52	100	-223,53

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.58. sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.384.397.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak Rp.1.051.962.520,- (turun sebanyak 55,88%).

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan

Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.59. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60.

Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perayaan Padusan	52.500	57.500	58.000	64.005	0
2	Perayaan Maleman	28.000	28.000	28.000	30.800	0
3	Perayaan Syawalan	51.700	52.500	53.000	58.500	0
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	14.000	15.600	9.600	4.200	0
6	OMAC	609.976	739.919	943.170	1.689.580	265.788



No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Jombor Permai	65.495	68.050	71.450	67.175	423.235
8	Makam Pandanaran	143.300	144.500	141.200	161.175	100.400
9	Makam Ronggowarsito	1.890	2.000	2.050	2.435	0
10	Pemandian Jolotundo	24.200	50.170	81.680	120.065	45.765
11	Candi Plaosan	53.883	80.454	218.718	153.027	
12	Makam Ki Ageng Gribig	3.000	3.030	3.041	4.030	
13	Lain-lain	23.850	13.450	12.460	28.880	6.535
14	Lain-lain diluar pendapatan	-	-	-	45.608	210.240
	Jumlah	1.071.794	1.255.173	1.622.369	2.430.005	1.051.962

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.60. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.430.005.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak Rp.1.051.962.520,- (turun sebanyak 55,88%), kondisi ini dipengaruhi karena Pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.61.

Tabel 3.61.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganyam
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu	Wisata Sejarah dan	Kec. Prambanan



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Candi Bubrah	Religi	
13.	Makam Ki Ajen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganyam
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganyam
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42	WatuPrahu Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
50	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60	Susur Kali Puser	Alam	Kec. Tulung
61	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 5.61. sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 66 (enam puluh enam) WO, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanyapun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbang, Candi Bubah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

Pada tahun 2020 untuk mewujudkan Sasaran strategis *Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata*, didukung dengan program:

1. Pengembangan Kemitraan;
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata.



Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- d. Masih terbatasnya penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;*



Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk: *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM* diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM* sebagaimana Tabel 3.62.

Tabel 3.62.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan,
Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	17,88	19,98	19,37	19,98	103,15	19,38	103,10
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	8,99	11,45	13	11,8	90,77	15	78,67

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2021.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2019 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 19,98%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

Disamping itu, tumbuhnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2019 nilai investasi PMDN sebanyak Rp.189.278.100.000,- dan PMA sebanyak 1.952.800 US\$, serta nilai ekspor dari 448.740.170,03 US\$ sedangkan pada tahun 2020 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp.698.896.464.253,- dan PMA sebanyak 66.100.000.000 US\$, serta nilai ekspor menjadi 90.224.785,50 US\$.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 55.070 UMKM, namun dari sebanyak 55.070 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.306 UMKM (atau 11,45%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 55.100 UMKM, namun dari sebanyak 55.100 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.500 UMKM (atau 11,8%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing* pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:



1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

Serta:

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- b. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- c. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL



27. Sasaran *Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah*;



Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: *Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah* sebagaimana Tabel 3.63.

Tabel 3.63.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	60	105	86,36	85	98,43	100	85

Sumber: Bappeda, 2021.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan, dan pada tahun 2020 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 34 kebijakan. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel. 3.64.

Tabel 3.64.
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TITIP BANDAKU	Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana yang berbentuk data digital dan digital baik perorangan maupun lembaga	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
2	SIMBAT (<i>Sistem Informasi Manajemen Obat</i>)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan
3	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak	Dinas Kesehatan
4	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat	Puskesmas
5	Matur Dokter	<p>Merupakan Inovasi untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di <i>launching</i> pada Desember 2019.</p> <p>Jenis-jenis layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam 2. Konsultasi kesehatan 3. Info Sehat 4. Tips Kesehatan 5. Berita Sehat 6. Forum Sehat 7. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS 8. Pelayanan Ambulance <p>Pelaksana Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten <p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15 Ambulance Matur Dokter (2 di Dinkes, 13 di Puskesmas) ◆ 3 Motor Matur Dokter ◆ Aplikasi Matur Dokter dan Aplikasi khusus driver ambulance ◆ Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas 	Dinas Kesehatan



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>1. Aplikasi Matur Dokter: Diunduh dari Play Store Handphone Android</p> <p>2. whatsapp : 0822 60000 910 3. Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330)</p> <p>Email : maturdokter@gmail.com</p> <p>Instagram: maturdokterkabklaten</p> <p>facebook : maturdokterkabklaten</p> <p>Twitter : maturdokterkabklaten</p>	
6	Apik (<i>Ayo Piknik ke Klaten</i>)	Sebuah aplikasi yang berbasis Internet yang menyajikan Obyek wisata, Kebudayaan dan Olahraga yang berada di Kabupaten Klaten yang menyajikan juga Informasi pendukung yang berkaitan dengan Obyek wisata tersebut	Disparbudpora
7	Aplikasi e-Awas Om (<i>Eling Waspada Omo Penyakit</i>) diganti Matur Tani	Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/petani di Kab. Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu)	DPKPP
8	Alat Pemanen Air Hujan	Alat yang berfungsi menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau	DLHK
9	BIOGAS	Alat pengolah sampah organik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi gas	DLHK
10	BIOPORI	Lubang lubang di sekitar lingkungan kantor yang berfungsi menyerap air hujan agar kembali ke tanah sekitar sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos skala kecil	DLHK
11	sistaru.klatenkab.go.id	Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031	DPUPR
12	Buku Matur Jujur	pembentukan budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat	Dinas Pendidikan



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif. Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi media berani menulis/mengungkapkan dengan " <i>matur jujur</i> " terhadap apa yang dilihat, dilakukan/dikerja	
13	KARSA TANDING (<i>Kerjasama Implementasi Rumah Sakit Tanpa Dinding</i>)	Model Pelaksanaan Promosi kesehatan melalui kerja sama stakeholder, mempercepat layanan informasi dan promosi, terjalannya komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit dan mitra fasilitas kesehatan, dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pembangunan kesehatan	RSD Bagas Waras Klaten
14	SI KREEASI (<i>Sistem Keuangan Rumah Sakit Yang Efisien, Efektif, Akuntabel Dan Terintegrasi</i>)	Menyajikan data pendapatan Rumah Sakit Bagas Waras Kab. Klaten dengan cepat sehingga dapat diketahui secara cepat kondisi keuangan yang aman	RSD Bagas Waras Klaten
15	ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK	Antrian pasien menuju ke poliklinik dengan tujuan agar pasien tertib dalam mengantri sehingga pasien datang awal mendapat pelayanan	RSD Bagas Waras Klaten
16	SISTEM ANTRIAN FARMASI	Waktu tunggu dalam kefarmasian yang bertujuan untuk mengetahui waktu pasien dalam menunggu racikan obat	RSD Bagas Waras Klaten
17	Aplikasi SAPA (<i>SMS layanan Kepegawaian</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis, Karsu, Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD 	BKPPD
18	Aplikasi SIAP (<i>Sistem Informasi Anjungan Layanan Kepegawaian</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt: Karis, Karsu, ijin 	BKPPD



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		gelar, ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistik kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat.	
19	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (<i>Computer Assisted Test</i>)	Untuk menghilangkan parktek pungutan dalam mutasi masuk	BKPPD
20	Penyelesaian Surat	Keputusan Pensiun PNS Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun	BKPPD
21	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah	BPKD
22	APL. SENSUS	Verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.	BPKD
23	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.	BPKD
24	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat	BPKD
25	e-PBB (pbb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (<i>Cloud System</i>) caranya cukup memasukkan NOP PBB	BPKD
26	e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online	BPKD
27	Pajak Online Penambahan	Loket pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay	BPKD
28	NAS BPKD NAS	<i>Network Attached Storage</i> yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan	BPKD



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP	
29	Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kab. Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kab. Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikandengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.	Bag. Perekonomian
30	SMARD ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke	Disdukcapil



No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		Desadesa meliputi: Up date Data, Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line Disdukcapil 31 PELAUT BALA Memberikan Pelayanan kepada kaum Divabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus	
31	BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK	Disdukcapil
32	Padi Rojolele Srinar dan Srinuk	Lolos 2 Varietas Padi Unggul (Rojolele Srinuk & Rojolele Srinar) Tahun 2019 Tingkat Nasional	Bappeda

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis *Inovasi yang Diterapkan* dengan Program Penelitian dan Pengembangan, dan program lainnya.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;



Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal sebagaimana Tabel 3.65.

Tabel 3.65.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman
Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):								
	PMDN	189	131	19	460	3	0,65	483	0,62
	PMA	46	264	139	294	12	4,08	294	4,08
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):								
	PMDN	1,75	1078	733	2,5	-79	-3160,00	2,50	-3160,00
	PMA	2,25	52	272	2,55	-59	-2313,73	2,55	-2313,73

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021.

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020, disajikan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66.

Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2016-2020

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)
2016	6.372.700	82.845.100.000	53	1.415	62.385.300.000	21	203
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-79

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.66. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, pada tahun 2018 nilai investasi PMA sebesar 3.091.400 US\$, tahun 2019 naik menjadi sebesar 11.490.893 US\$, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 66.100.000.000 US\$ (atau turun 59 %). Begitu juga dengan pada tahun 2018 nilai investasi PMDN sebesar Rp.229.788.500.000,- pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.1.914.915.766.292,- (naik 733%), dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak Rp.698.896.464.253,- (atau turun 64%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratraktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67.
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	21	41	67	870	4743
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.861	2.781	1.793	16.772	12.980
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766.	698.896.464

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.68.



Tabel 3.68.
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	53	43	39	15	5
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.468	79	561	2.087	59
3	Nilai Investasi	(US \$)	6.372.700	10.257.000	3.091.400	11.490.893	4.721.429

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.67. dan Tabel 3.68. sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2020 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran; *Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal* didukung dengan program:

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Tingginya harga tanah untuk pengembangan dan penanaman investasi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional; dan
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Data Saing Sektor Ketenagakerjaan;



Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk,

terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan disajikan pada Tabel 3.69.

Tabel 3.69.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah
dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,87	1	1,07	0,96	89,72	1,08	88,89
2	Angka partisipasi angkatan kerja	6,779	73,58	81	69	98,79	143,17	69	143,17

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 963.445 jiwa dan yang bekerja sebesar 70,72%, dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebanyak 1%. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi jumlah angkatan kerja sebanyak 639.217 jiwa dan yang bekerja sebesar 616.528 orang, dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 0,96 %

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2019 sebesar 81%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,79 % (atau naik 17,79%). Sehingga masalah angkatan kerja yang perlu mendapat perhatian besar adalah soal penyerapan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Peningkatan Kesempatan Kerja.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;



- b. Peluang kerja belum bisa menampung kebutuhan pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.



30. Sasaran *Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;*



Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan* disajikan pada Tabel 3.70.

Tabel 3.70.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	82,59	71,48	88,2	43,12	48,89	25,5	169,10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.70, sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2018 jumlah pekerja/buruh sebanyak 64.010 orang, dan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 52.866 peserta (atau 82,59%), dan pada tahun 2019 jumlah pekerja/buruh naik menjadi sebanyak 72.639 orang, dan yang peserta program BPJS justru mengalami penurunan menjadi sebanyak 51.922 peserta (atau 71,48%), dan pada tahun 2020 jumlah pekerja/buruh naik menjadi sebanyak 123.550 orang, dan yang menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan justru turun menjadi sebanyak 56.697 peserta (atau 43,12%).

Penurunan ini disebabkan gagal setor, dan pindah kerja. Sebagian peserta Program BPJS Ketenagakerjaan tersebar di PMA dan PMDN yang ada di Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran *Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan* di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok - kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak - hak pekerja; dan
- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;*

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian* diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian* sebagaimana Tabel 3.71.



Tabel 3.71.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	35,94	37,00	35,2	37,00	105,11	35,2	95,14
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	1,80	7,6	7,5	3,54	47,2	7,5	47,2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

*) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2020 angka sementara.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 37,00%, dan pada tahun 2020 capaiannya juga sebesar 37,00%. Sumbangan ini ditunjang dari nilai investasi pada tahun 2019 sebesar 11.490.893 US\$, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 66.100.000.000 US\$ (atau turun 59 %). Begitu juga dengan pada tahun 2018 nilai investasi PMDN sebesar Rp.229.788.500.000,- pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.1.914.915.766.292,- (naik 733%), dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak Rp.698.896.464.253,- (atau turun 64%).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 jumlah IKM sebanyak 34.828 IKM dan yang memiliki daya saing baru mencapai 7,6% (atau sebanyak 2.647 IKM), sedangkan pada tahun 2020 jumlah IKM menjadi sebanyak 8.335 IKM dan yang mempunyai daya saing mencapai 3,54 % (atau sebanyak 295 IKM).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;



- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk - produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;*



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah,

Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.



Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat](#) disajikan pada Tabel 3.72.

Tabel 3.72.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana
Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Layanan Infrastruktur	26,27	58,61	60,87	38,96	60,87	156,24	38,16	160

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 60,87% (471,86 Km), sedangkan pada tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sepanjang 475,86 Km, dan drainase dalam kondisi baik 60,87%. Program pendukung pencapaian sasaran [Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat](#), diantaranya:

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
4. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat karena tonase dan kelas jalan, kurangnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan



- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja Tim Pembina Jasa Konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;*



Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan* disajikan pada Tabel 3.73.

Tabel 3.73.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan
Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	43,58	45,87	57,52	69,83	121,40	57,52	121,40

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat pada tahun 2019 sebesar 45,87% menjadi 69,83% pada tahun 2020, angka tersebut sudah diatas target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 57,52%. Persentase tingkat realisasinya sebesar 121,40%, pencapaian indikator pelayanan infrastruktur perhubungan dengan didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.657	9.622	8.878	8.591	8.072
02 Mobil Bus					
* Umum	464	397	384	408	391
<i>Bus Besar</i>	44	65	97	88	91
<i>Bus Sedang</i>	131	261	248	268	215
<i>Bus Kecil</i>	289	71	39	52	85
* Bukan Umum	137	105	111	117	97
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	6	10	21	7
Jumlah	11.731	10.527	9.767	9.545	8.958

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.74. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.75.



Tabel 3.75.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran [Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan](#), dilaksanakan dengan program:

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; dan
3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Permasalahan:

- a. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal;
- b. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C);
- c. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya;
- d. Masih minimnya jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CC Room*;
- e. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah;
- f. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal; dan
- g. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.



34. Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;*



*M*enghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.76.

Tabel 3.76.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan
dan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	57,71	34,08	53,76	74,05	74,05	100	74	100,68

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber

pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Penanganan RTLH sebanyak 3.158 unit.

Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
5. Pengembangan Perumahan;
6. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
7. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan
8. Pembangunan infrastruktur pedesaan/ perkotaan.

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.



35. Sasaran *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang*;



Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Adapun capaian sasaran: *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang* sebagaimana Tabel 3.77.

Tabel 3.77.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	78,98	79,6	79,6	100,00	80,00	99,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, untuk mengimplementasikan hal ini pada tahun 2019 ketaatan terhadap RTRW mencapai 78,98%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 79,6%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya untuk mewujudkan konsistensi untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobasan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang* dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.

Permasalahan:

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat tentang RTRW; dan
- f. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi:

- a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.



36. Sasaran *Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;*



Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran: *Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup* disajikan pada Tabel 3.78.

Tabel 3.78.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	18,28	28,46	38,02	36,16	95,11	40,46	89,37
2	Indeks kualitas udara	60,00	83,3	82,29	82,02	76,82	93,68	84,46	90,95
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	42,54	83,3	56,16	42,54	75,75	58,60	72,59

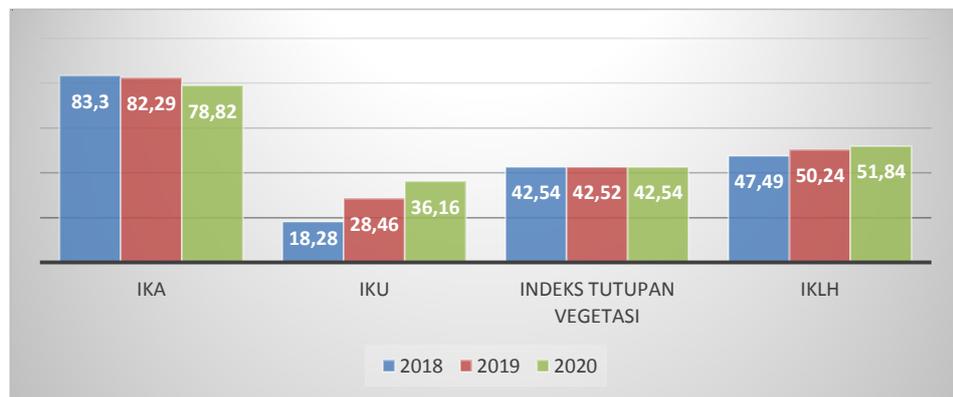
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 sebesar 36,16, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,82, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,54. Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang



dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2018-2020 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Grafik 3. 15.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

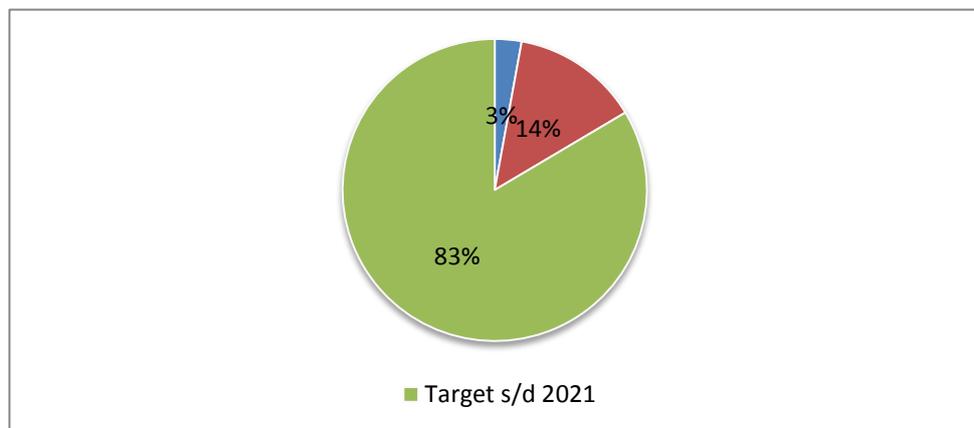
Grafik 3.15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2020

Berdasarkan Grafik 3.15. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 3,47 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 7,7 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2019 sebesar 42,52 menjadi 42,54. Pada Tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 51,84. Meningkatkan dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 50,24, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2019 sebanyak 5 aduan masyarakat di mana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2019

lebih baik dari pada tahun 2018 dimana persentase capaian indikator sasaran ditahun 2018 sebesar 83% menjadi 100% di tahun 2019.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Grafik: 3.16. Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran *Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;*



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: *Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana* sebagaimana Tabel 3.79.

Tabel 3.79.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021.

Pada tahun 2020 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “*Desa Paseduluran*” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: *Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana* di Kabupaten Klaten dengan upaya penguatan mitigasi bencana.

Kondisi kebencanaan yang wajib diperhatikan, diantaranya:

- 1) Bencana Banjir, sering terjadi di Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk. Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor.
- 2) Gempa bumi, Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Di sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.
- 3) Rawan bencana tanah longsor/ gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kecamatan Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.
- 4) Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan yang letaknya berdekatan dengan sumber bahaya Gunungapi Merapi. Jika Gunungapi Merapai mengalami erupsi maka pada kawasan ini sering dilanda awan panas, aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar) sehingga kawasan ini memiliki ancaman resiko tinggi. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda dua hal, yaitu aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan lahar dan lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar).

Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
3. Peningkatan Pengelolaan Logistik;



Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakan:

- 1) Mengurangi risiko bencana; dan
- 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
 - (1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
 - (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
 - (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;



*M*emperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi* sebagaimana Tabel 3.80.

Tabel 3.80.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan
Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,17	80	77,22	96,53	75,70	102

Sumber: Kesbangpol Klaten 2021.

*) Angka sementara, mengingat tahun 2020 update data dalam proses.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 72,17 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22%.

Pengukuran atas indeks komposit pembentuk IDI pada tahun 2020, diperoleh dari komponen: 1) Kebebasan Sipil (skor 78,43), 2) Hak-Hak Politik (skor 67,91), dan 3) Lembaga Demokrasi (skor 90,50).

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) memperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang.

Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan: [Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi](#) diantaranya:

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten; dan
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat; dan
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.



39. Sasaran *Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;*



Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya disajikan pada Tabel 3.81.

Tabel 3.81.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam
Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	58	83	61	73,49	100	61

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2019 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang, atau naik sebanyak 9 orang (atau 18,37%) dibanding tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 61 orang.

Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



Uukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada Tabel 3.82.

Tabel 3.82.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	92,2	96	99	98	98,99	100	98,99

Sumber: Satpol PP, 2021.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 3.82. di atas, memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda pada tahun 2018 mencapai 90,91% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 96% (dari sebanyak 1.254 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 1.159 kasus yang diselesaikan) kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 98%. Hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar



Golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.83.

Tabel 3.83.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2016	12	14	7	8	46	12	4
2	2017	15	15	8	6	58	12	14
3	2018	15	8	6	10	78	18	7
4	2019	20	12	5	12	37	38	8
5	2020	16	17	15	6	54	31	17

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan.
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang.
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut.
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.83. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.84.



Tabel 3.84.
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
2	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
3	2018	0	0	0	0	0
4	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
5	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.84. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	17	-	-	1	-
2.	Konflik Sara	17	3	1	1	7
3.	Gerakan Radikalisme	21	9	2	1	1

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.85. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Sedangkan konflik sara terjadi terbanyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus,



sedangkan Gerakan Radikalisme sebanyak 21 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir permasalahan ketentraman umum.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: *Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)* maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

a. Tahun 2016 : 4,19

Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.

b. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.

c. Tahun 2018 : 1,89.

Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 dikali 10.000

d. Tahun 2019 : 2,73

Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 dikali 10.000.

e. Tahun 2020 : 1,81

Jumlah kriminalitas tertangani 240 kasus dibagi jumlah penduduk 1.327.577 dikali 10.000.

Sumber Kesbangpol, 2021.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Perda/Perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparaturnya penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: [Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat](#) yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
2. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);



3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakkriminal; dan
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;



Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/*goals* dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa

foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: [Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak](#) disajikan pada Tabel 3.86.

Tabel 3.86.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	60,25	60,3	72,35	119,98	60,37	119,84
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

Catatan: capaian tahun 2020 angka sementara, karena rilis data belum keluar.

Pada tabel 3.86 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender meningkat menjadi 72,35%.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2016-2020 menunjukan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.87.



Tabel 3.87.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	73,97	96,54	96,62	96,62	96,62

Sumber : Dinsos P3A dan KB, 2020.

Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.87. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 96,62% dan pada tahun 2019 sementara tetap 96,62%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.88.

Tabel 3.88.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	18	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	49,7	43,65	52,71	52,71	55,73
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,69	37,76	37,77	37,77	37,81
4	IDG	59,95	59,60	60,25	60,25	72,35

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

Catatan: *) angka sementara update terakhir per Februari 2020. (IDG)

Berdasarkan Tabel 3.38. sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



selama tahun 2016-2020 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% (atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2016-2020 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.89.

Tabel 3.89.

Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	$(7.072/27.344) = 25,86$	56,6	57	59,7	14,35
2	Legislatif (%)	$(3/50) = 6,00$	$(3/50) = 6,00$	$(3/50) = 6,00$	$(9/50) = 18$	$(9/50) = 18$

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021 (diolah.)

Berdasarkan Tabel 3.89. sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2015-2018 stagnan karena masih dalam satu periode DPRD hasil Pemilu tahun 2014, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.90.



Tabel 3.90.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.90. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2018-2019) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 6 kasus dari tahun 2018 sebesar 51 kasus menjadi 57 kasus di tahun 2019, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan. Pada tahun 2020 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berkurang menjadi 40 kasus.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Permasalahan:

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi:

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan



d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;*



Uukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan

diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan. Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan* disajikan pada Tabel 3.91.

Tabel 3.91.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	78,95	79,02	81,09	79,95	98,59	81,08	98,61

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 3.91. di atas yaitu mencapai 79,95% di tahun 2020 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 3.92.



Tabel 3.92.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.657	9.622	8.878	8.591	8.072
02 Mobil Bus					
* Umum	464	397	384	408	391
<i>Bus Besar</i>	44	65	97	88	91
<i>Bus Sedang</i>	131	261	248	268	215
<i>Bus Kecil</i>	289	71	39	52	85
* Bukan Umum	137	105	111	117	97
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	6	10	21	7
Jumlah	11.731	10.527	9.383	9.137	8.567

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.93.

Tabel 3.93.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan* yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



Permasalahan:

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi:

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;*



Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat* disajikan pada Tabel 3.94.

Tabel 3.94.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu,
Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50	80,52	78,37	80	81,60	102,00	80,00	102

Sumber: DPM dan PTSP, 2021.

Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 81,60 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 8 (delapan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Disamping itu pada tahun 2019 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin usaha berdasarkan jenis usaha, diantaranya: 1. *Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha*, 2. *Perusahaan menengah sebanyak 367 izin usaha*, dan 3. *Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha*. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. *Perusahaan Terbatas (PT) sebanyak 46 PT*, 2. *CV sebanyak 73*, dan 3. *Lainnya sebanyak 193 HO*. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah izin OSS sebanyak 4.748 izin, sedangkan penerbitan Non OSS sebanyak 1.987 izin.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan.

Permasalahan:

- a. Belum ada jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.



Solusi:

- c. Percepatan realisasi pelaksanaan Tugas Satgas Percepatan Realisasi Investasi; dan
- d. Penyusunan rencana Aksi Daerah Percepatan Investasi Daerah.

44. Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;*



Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.323.609 orang, yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 957.821 orang dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas sebagaimana Tabel 3.95.

Tabel 3.95.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	82,74	91,77	Sdh (92,7)	Sdh (81,6)	88,03	sdh	Sdh

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.96.

Tabel 3.96.
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Akte	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelahiran	22.356	23.256	27.755	26.582	19.511
2	Kematian	615	1.400	2.116	1.800	2,922
3	Perkawinan	441	450	473	472	397
4	Perceraian	58	58	71	76	166

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.97. sebagaimana tersebut di atas, untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program **e-KTP** sampai dengan tahun 2020 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 957.821 orang, dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten *yang belum* memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.96. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 3.97.

Tabel 3.97.
Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2016	927.310	93.846
2	2017	894.986	91.538
3	2018	877.190	71.223
4	2019	850.325	55.921
5	2020	827.614	19.522

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.97. sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2016–2020 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program **e-KTP**, juga



kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan semakin tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas dengan program Penataan Administrasi Kependudukan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketrasmigrasian;



Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2016-2020 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2019 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran: Pengembangan Ketrasmigrasian disajikan pada Tabel 3.98.



Tabel 3.98.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengembangan Ketransmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	-80	5,2	41,5	5,2	12,53	42	12,38

Sumber: Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 56 jiwa (20 KK). Sedangkan yang diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 44 jiwa (14 KK), dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 0 jiwa (0 KK).

Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.99.

Tabel 3.99.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan
Tahun 2016-2020

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK (2)	Jiwa (3)	KK (4)	Jiwa (5)	KK (6)	Jiwa (7)
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 3.99. sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya kuota penempatan transmigrasi asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan *kuota* dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

- Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup:
- Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.



- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkaran sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

3.3 Akuntabilitas Anggaran*)

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.2.509.533.202.687,- (*dua trilyun lima ratus sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.2.449.449.159.159 (*dua trilyun empat ratus empat sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 246.558.797.199,- (*dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.329.918.589.703,- (*tiga ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), atau melampaui target sebanyak Rp.83.359.792.404,- (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.1.533.062.670.188,- (*satu milyar lima ratus tiga puluh tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh delapan puluh rupiah*), dan terealisasi sebesar Rp.1.516.494.102.076,- (*satu trilyun lima ratus enam belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua ribu tujuh enam puluh rupiah*) atau 98,92%.

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.729.911.735.200,- (*tujuh ratus dua puluh*



sembilan milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), dan terealisasi sebesar Rp.603.036.467.380,- (enam ratus tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh) atau 82,62%.

2. Belanja Daerah

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.2.917.442.203.797,28 (*dua trilyun sembilan ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah*), dan terserap sebanyak Rp.2.401.393.532.618,- (*dua trilyun empat ratus satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 sebesar Rp.2.093.641.067.774,- (*dua trilyun sembilan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.1.737.015.482.020,- (*satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar lima belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah*). Atau terserap 82,97%

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung (mendanaikan program dan kegiatan) pada tahun 2020 direncanakan sebanyak Rp.823.801.136.023,28 (*delapan ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah*), dan terealisasi sebanyak Rp.664.378.050.598,- (*enam ratus enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*). Atau terserap 80,65%

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran Daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan pembiayaan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.408.909.001.110,28,- (*empat ratus delapan milyar sembilan ratus sembilan juta satu ribu seratus sepuluh koma delapan puluh delapan rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Pada tahun 2020 terdapat sisa lebih lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp.455.964.627.651,28 (*empat ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu koma dua puluh delapan rupiah*).

*) Catatan: input data jam 9.17 WIB tanggal 18 Januari 2021.



Tabel 3.100.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	52	98,37	189,2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1. Dinas 2. TK 3. SKB	520.493.000 18.414.413 12.645.500	497.375.140 17.141.934 12.463.000	95,56 93,09 98,56
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	90	90,63	107	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.098.581800	14.417.905.719	75,49
							Pendidikan Non Formal: 1. Dinas 2. SKB	672.243.000 27.910.452	626.583.350 27.848.300	93,21 99,78
							Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.793.650.000	32.524.440.268	99,18
							Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0	0	0
							Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.620.251.176	1.574.675.700	97,19

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD 2. SMP	81.822.746.352 47.219.414.263	76.711.955.681 42.830.152.031	93,75 90,70
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	15	17	113,33	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	24.540.004.829 22.323.758.000	21.213.773.678 16.856.214.913	86,45 75,51
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,09	9,34	92,57	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	13.294.496.000	12.353.214.000	92,92
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,63	1,52	93,25	Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.690.912.000	3.455.323.088	93,62
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,71	0,90	126,76	Pengawasan Obat dan Makanan	292.728.500	213.376.900	72,89
							Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	143.022.800	135.418.500	94,68
							Perbaikan Gizi Masyarakat	668.381.500	604.014.598	90,37
							Pengembangan Lingkungan Sehat	505.000.000	395.600.100	78,34
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan: 1. Dinas 2. Puskesmas	90.107.000 70.691.290.782	83.411.502 60.277.282.932	92,57 85,27

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	34.318.684.000	22.874.923.625	66,65
							Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	14.441.106.000	12.813.389.066	88,73
							Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata	4.609.462.000	4.335.658.058	94,06
							Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	39.855.000	29.079.750	80,79
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	2,12	2,1	99,06	Keluarga Berencana	8.347.386.000	5.871.199.832	70,34
							Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	34.175.500	33.500.190	98,02
							Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pelayanan kontrasepsi	0	0	0
							Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	0	0	0
							Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	0	0	0
							Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0	0	0
							Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Pembinaan Keluarga Sejahtera)	305.413.000	217.836.409	71,33
							Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	0	0	0
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,78	100,21	Pelayanan Kesehatan	53.674.822.025,28	50.311.520.846	93,73
							Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87	98,4	113,10	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	405.000.000	395.103.900	97,56
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	99	96	96,97	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	657.240.000	596.341.630	90,73
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13	12,35	95,00	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial: 1. Dinsos P3A dan KB 2. Kesra	1.400.623.000 1.965.000	1.397.815.284 1.965.000	99,80 100
							Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)/ Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	23.189.000	23.188.400	100
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	55,71	55,71	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	45.000.000	43.808.200	97,35

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	8,26	165,2	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	255.107.000	245.179.783	96,11
							Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0	0	0
							Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba:	0	0	0
							Pembinaan Pemuda dan Olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	278.642.000 21.300.000	272.336.600 19.080.000	97,74 89,58
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	-75	-1250	Pengelolaan Kekayaan Budaya	322.953.000	315.653.768	97,74
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	100	1000	Pengembangan Nilai Budaya	71.300.000	69.794.782	97,89

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengelolaan Keragaman Budaya	5.700.000	5.700.000	100,00
							Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	0	0	0
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-15,13	-302,55	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	215.618.750	194.783.400	90,34
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.050.000.0000	894.864.230	85,23
							Pembinaan dan Pengembangan Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	7.650.000 2.467.000.000	7.544.125 3.776.110.192	98,62 68,66
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.280.512.850	9.290.656.940	82,36
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	83,33	92,59	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	26.812.231.500	20.517.822.724	76,52

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DPRD									
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	3.544.368.000	3.369.841.310	95,08
							Perencanaan Pembangunan Ekonomi	568.000.000	519.383.270	91,44
							Perencanaan Sosial dan Budaya	490.000.000	429.260.487	87,60
							Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	516.625.000	488.098.606	94,48
							Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	235.000.000	217.285.511	92,46
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	8,72	174,4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	176.620.475	152.963.231	86,61
							Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	28.928.686	25.101.586	86,77
							Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan	16.040.000	11.491.000	71,64
14	Meningkatkan tata	Persentase	%	87	88	101	Peningkatan Kapasitas	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel					Aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan			
							Tata Kelola Pemerintah Desa	233.875.000	203.630.451	87,07
							Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.865.543.200	3.426.581.198	88,64
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	53.753.500	52.376.200	97,44
							Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	2.970.000	2.966.000	99,87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)	61,32 (B)	90,18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	313.180.800	261.767.804	83,58
							Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:			
							1. Inspektorat	6.439.275.250	5.890.135.727	91,47
							2. Setda Bagian Organisasi	65.175.000	62.614.500	96,07

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05	3,21	105,25	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Pemerintahan 2. Umum	334.247.500 2.209.843.000	305.890.280 2.185.588.594	91,52 98,90
							Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	63.533.000	61.817.602	97,30
							Pengembangan Wilayah Perbatasan	48.025.000	42.645.000	88,80
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Kelola Kecamatan	32.626.700	29.934.332	91,75
							Pengembangan Komonikasi, Informasi dengan Mass Media (Humas)	367.811.300	365.302.000	99,32
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	5.946.048.495	5.750.902.953	96,72
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	4.458.753.087	3.745.845.813	84,01

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	490.232.000	465.897.728	95,04
							Kerjasama Informasi dengan Mass Media (Humas)	2.114.454.000	2.055.491.000	97,21
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	90	100	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.396.140.000	1.206.851.000	86,44
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	80	95,7	119,63	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	560.100.000	543.132.000	96,97
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	97	107,78	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	704.262.290	608.408.412	86,39



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	217.109.000	162.037.682	74,63
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	99,42	101,45	Kerjasama dengan Mass Media:	405.000.000	393.642.000	97,20
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	98	98,61	100,62	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	17.500.000	17.417.500	99,99
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	98	98,89	100,91	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	13.480.000	13.479.800	99,99
							Penanganan Pengaduan Masyarakat	12.500.000	11.973.750	95,89
							Peningkatan Persandian Daerah	31.000.000	30.703.500	99,04
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	1,38	39,43	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	13.210.000	13.200.000	100
							Peningkatan Keagamaan	1.938.852.000	1.620.008.769	83,56
							Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	0	0	0
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4	10,57	85,24	Peningkatan Ketahanan Pangan:			
							1. Pertanian	4.267.451.000	4.078.017.872	95,56
							2. Setda Perekonomian	71.000.000	67.232.000	94,69
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	1.818.275.103	1.683.279.371	92,58
							Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	27.874.000	24.723.300	88,70
							Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	431.000,000	409.359.670	94,98
Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.170.190.000	1.045.520.900	89,35							

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.068.350.000	1.416.445.100	68,48
							Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0	0	0
							Pengembangan Perikanan Tangkap	50.000.000	45.101.584	90,20
							Pengembangan Budidaya Perikanan	1.690.061.000	1.098.501.275	65,00
							Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	295.000.000	234.530.000	79,50
							Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	175.275.000	156.642.050	89,37
							Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	40.500.000	33.389.300	82,44
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	50	42	84,00	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	112.903.375	99.493.186	88,12
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	-55,88	-223,53	Pengembangan Kemitraan	132.410.000	130.955.727	98,90
							Pengembangan	798.880.000	793.898.741	99,38

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pemasaran Pariwisata			
							Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.181.907.000	2.747.189.892	86,34
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37	19,98	103,15	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	850.000.000	670.485.982	78,88
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	13	11,8	90,77	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	182.000.000	162.684.917	89,39
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100.000.000	83.999.900	84,00
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	349.000.000	298.063.840	85,41
							Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.108.584.750	4.313.848.050	84,44
							Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	350.000.000	323.924.300	92,55

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	86,36	85	98,8	Penelitian dan Pengembangan	500.000.000	447.791.185	89,56
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: 1. DPM dan PTSP 2. Setda Perekonomian	129.405.000 89.400.000	127.388.060 87.247.000	98,44 99,98
		PMDN	%	460	3	0,65				
		PMA	%	294	12	4,08				
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	191.617.360	183.594.076	95,81
		PMDN	%	2,5	-79	-3160,00				
		PMA	%	2,55	-59	-2313,73				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,07	0,96	89,72	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	807.800.000	551.191.700	68,23
		Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	69	98,79	143,17	Peningkatan Kesempatan Kerja	127.200.000	80.173.084	63,03

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2	43,12	48,89	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	159.654.000	125.989.950	78,91
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	37,00	105,11	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	529.525.000 263.000.000	459.388.750 247.518.000	86,76 94,11
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5	3,45	47,2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	300.000.000	250.206.500	83,40
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	38,96	60,87	156,24	Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	37.456.650.000 19.246.761.900	20.899.052.525 14.378.132.557	55,80 74,70
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	11.949.102.455	5.772.341.706	48,31
							Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	553.019.875	274.937.054	49,72
							Penataan Trotoar Jalan	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	69,83	121,40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	0	0
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.204.955.000	1.109.880.890	92,11
							Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.058.161.000	2.939.656.192	96,12
							Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	146.504.000	143.010.730	97,62
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,05	74,05	100	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. DPU	30.009.935.500	23.232.913.089	77,42
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU	200.000.000	195.094.250	97,55
							2. Perwaskim	3.212.005.000	369.978.666	11,51
							Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	2.416.849.000	1.752.421.550	72,50
							Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	42.303.305.000	39.674.636.321	93,78
							Pengembangan	300.000.000	112.326.100	37,44

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Perumahan			
							Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	910.000.000	895.902.150	98,5
							Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan	100.000.000	53.044.250	53,04
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	79,6	79,6	100,00	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang:			
							1. DPU	120.000.000	113.837.800	94,86
							2. Perwaskim	552.965.000	284.994.325	51,54
							Perencanaan Tata Ruang	400.000.000	237.516.348	59,38
							Pemanfaatan Ruang	90.000.000	30.198.250	33,55
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,02	36,16	95,11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	685.424.200	478.495.476	69,81
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,02	76,82	93,68	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	503.870.000	464.309.750	92,15
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	56,16	42,54	75,75	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	424.325.000	374.049.350	88,15
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
							1. DPU	10.453.666.000	8.013.292.381	76,66
							2. DLHK	4.134.043.800	3.722.711.535	90,05
							Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	245.000.000	224.613.500	91,68

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): 1. DPU 2. DLHK	5.767.781.200 981.866.367	4.428.096.558 934.713.463	76,77 95,20
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Kelas Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	484.550.000	415.670.651	85,78
							Penanganan Darurat Bencana:	1.903.278.000	1.651.524.721	86,77
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	2.218.819.313	217.997.970	9,82
							Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	9.692.000	9.685.000	100
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	80	77,22	96,53	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	50.000.000 75.340.000	0 72.425.800	0 96,00
							Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	223.500.000	213.481.300	95,52
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan	Klpk	83	61	73,49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	279.266.600	267.217.750	95,69

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)								
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	673.813.016	665.259.270	98,73
							Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2,659.238.800	2.511.989.427	94,46
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	99	98	98,99	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	1.346.950.000	1.255.545.430	93,2
							Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	147.500.000	146.189.590	99,10
							Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	1.170.750.000 1.237.250.000	1.149.239.350 1.178.535.000	98,16 96,00
							Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakriminal	5.000.000	4.767.900	98,16

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	200.000.000	198.712.300	96,00
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,3	72,35	119,98	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	70.057.600	68.113.350	97,22
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	47.964.800	47.771.650	99,60
							Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	89.057.100	85.962.396	96,53
							Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0	0	0
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,09	79,95	98,59	Peningkatan Pelayanan Angkutan	375.800.000	368.401.634	98,03
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	81,60	102,00	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja					Program	Anggaran		
		Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh (92,7)	Sdh (81,6)	88,03	Penataan Administrasi Kependudukan	4.811.680.783	3.942.799.508	81,94
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41,5	5,2	12,53	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	21.000.000	19.920.516	94,86
							Transmigrasi Lokal	0	0	0
Jumlah Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupati)								749.734.071.372	618.720.315.867	82,53
Jumlah Belanja Langsung								823.801.136.023,28	664.378.050.598	80,65
Jumlah Belanja Tidak Langsung								2.093.641.067.774	1.737.015.482.020	82,97
Jumlah Total Belanja Daerah								2.917.442.203.797,28	2.401.393.532.618	82,31

3.4 Efektifitas Sumber Daya

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2020, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (*enam puluh tujuh*) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 97% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 3.101.

Tabel 3.101.
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	189,2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1. Dinas 2. TK 3. SKB	95,56 93,09 98,56	Efisiensi
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	107	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	75,49	Efisiensi
					Pendidikan Non Formal: 1. Dinas 2. SKB	93,21 99,78	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99,18	Efisiensi
					Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0	Efisiensi
					Manajemen Pelayanan Pendidikan	97,19	Efisiensi
					Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS): 1. SD 2. SMP	93,75 90,70	Efisiensi
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	113,33	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	86,45 75,51	Tdk efisien
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	92,57	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	92,92	Efisien
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	93,25	Obat dan Perbekalan Kesehatan	93,62	Efisiensi
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	126,76	Pengawasan Obat dan Makanan	72,89	Efisiensi
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	94,68	Efisiensi
					Perbaikan Gizi Masyarakat	90,37	Tdk efisien
					Pengembangan Lingkungan Sehat	78,34	Efisiensi
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan: 1. Dinas 2. Puskesmas	92,57 85,27	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	66,65	Efisiensi
					Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	88,73	Efisiensi
					Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata	94,06	Efisiensi
					Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	80,79	Efisiensi
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	100,21	Pelayanan Kesehatan	93,73	Efisiensi
					Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	0	
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	113,10	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	97,56	Efisiensi
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96,97	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	90,73	Efisiensi
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	95,00	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial:		Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(PMKS)			1. Dinsos P3A dan KB 2. Kesra	99,80 100	
					Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)/ Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100	Efisiensi
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	99,06	Keluarga Berencana	70,34	Efisiensi
					Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	98,02	Efisiensi
					Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	0	Efisiensi
					Pelayanan kontrasepsi	0	Efisiensi
					Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	0	Efisiensi
					Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	0	Efisiensi
					Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0	Efisiensi
					Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Pembinaan Keluarga Sejahtera)	71,33	Efisiensi



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	0	Efisiensi
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5571	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	97,35	Efisiensi
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	165,2	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	96,11	Efisiensi
					Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0	Efisiensi
					Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba:	0	Efisiensi
					Pembinaan Pemuda dan Olahraga: 1. Disbudparpora 2. Kesra	97,74 89,58	Efisiensi
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	-1250	Pengelolaan Kekayaan Budaya	97,74	Tdk efisiensi
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	%	1000	Pengembangan Nilai Budaya	97,89	Tdk efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dilestarikan					
					Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Tdk efisiensi
					Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	0	
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-302,55	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	90,34	Tdk efisiensi
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,23	efisiensi
					Pembinaan dan Pengembangan Aparatur: 1. Setda Organisasi 2. BKPD	98,62 68,66	efisiensi
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	82,36	Efisiensi
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	92,59	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	76,52	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	95,08	Efisiensi
					Perencanaan Pembangunan Ekonomi	91,44	Efisiensi
					Perencanaan Sosial dan Budaya	87,60	Efisiensi
					Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	94,48	Efisiensi
					Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	92,46	Efisiensi
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	174,4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	86,61	Efisiensi
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	86,77	Efisiensi
					Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	71,64	Efisiensi
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	101	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	0	Efisiensi
					Tata Kelola Pemerintah Desa	87,07	Efisiensi
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	88,64	Efisiensi
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	100	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	97,44	Efisiensi
					Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	99,87	Efisiensi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	90,18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	83,58	Efisiensi
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 3. Inspektorat 4. Setda Bagian Organisasi	91,47 96,07	Efisiensi
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	105,25	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1. Pemerintahan 2. Umum	91,52 98,90	Efisiensi
					Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	97,30	Efisiensi
					Pengembangan Wilayah Perbatasan	88,80	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitasi administrasi Tata Kelola Kecamatan	91,75	Efisiensi
					Pengembangan Komonikasi, Informasi dengan Mass Media (Humas)	99,32	Efisiensi
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	96,72	Efisiensi
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	84,01	Efisiensi
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	95,04	Efisiensi
					Kerjasama Informasi dengan Mass Media (Humas)	97,21	Efisiensi
							Efisiensi
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	100	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	86,44	Efisiensi
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	119,63	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	96,97	Efisiensi



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	107,78	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	86,39	Efisiensi
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	74,63	Efisiensi
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	101,45	Kerjasama dengan Mass Media:	97,20	Efisiensi
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100,62	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	99,99	Efisiensi
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100,91	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	99,99	Efisiensi
					Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,89	Efisiensi
					Peningkatan Persandian Daerah	99,04	Efisiensi
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	39,43	-	-	

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	Efisiensi
					Peningkatan Keagamaan	83,56	Efisiensi
					Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	0	
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	85,24	Peningkatan Ketahanan Pangan:		Tdk Efisiensi
					1. Pertanian	95,56	
					2. Setda Perekonomian	94,69	
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	92,58	Tdk Efisiensi
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	88,70	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	94,98	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Kesejahteraan Petani	89,35	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	68,48	Efisiensi
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0	Efisiensi					

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengembangan Perikanan Tangkap	90,20	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Budidaya Perikanan	65,00	Efisiensi
					Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	79,50	Efisiensi
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	89,37	Tdk Efisiensi
					Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	82,44	Efisiensi
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	84,00	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	88,12	Tdk Efisiensi
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	-223,53	Pengembangan Kemitraan	98,90	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	99,38	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	86,34	Tdk Efisiensi
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	103,15	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	78,88	Efisiensi
		Persentase UMKM yang	%	90,77	Pengembangan Sistem Pendukung	89,39	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memiliki daya saing			Usaha Bagi UMKM		
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	84,00	Efisiensi
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	85,41	Efisiensi
					Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	84,44	Efisiensi
					Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	92,55	Efisiensi
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	98,8	Penelitian dan Pengembangan	89,56	Efisiensi
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: 1. DPM dan PTSP 2. Setda Perekonomian	98,44 99,98	Tdk Efisiensi
		PMDN	%	0,65			
		PMA	%	4,08			
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	95,81	Tdk Efisiensi
		PMDN	%	-3160,00			
		PMA	%	-2313,73			
29	Meningkatnya nilai	Rasio penduduk yang bekerja	%	89,72	Peningkatan Kualitas dan	68,23	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan				Produktivitas Tenaga Kerja		
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	99,70	Peningkatan Kesempatan Kerja	63,03	Efisiensi
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	48,89	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	78,91	Tidak Efisiensi
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	105,11	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	86,76 94,11	Efisiensi
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	47,2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	83,40	Tidak Efisiensi
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	156,24	Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,80	Efisiensi
					Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	74,70	Efisiensi
					Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	48,31	Efisiensi
					Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	49,72	Efisiensi
					Penataan Trotoar Jalan	0	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	121,40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	Efisiensi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	92,11	Efisiensi
					Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	96,12	Efisiensi
					Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	97,62	Efisiensi
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	100	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan DPU	77,42	Efisiensi
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU 2. Perwaskim	97,55 11,51	Efisiensi
					Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	72,50	Efisiensi
					Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	93,78	Efisiensi
					Pengembangan Perumahan	37,44	Efisiensi
					Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	98,5	Efisiensi
					Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	72,50	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan	53,04	Efisiensi
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,00	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang: 1. DPU 2. Perwaskim	94,86 51,54	Efisiensi
					Perencanaan Tata Ruang	59,38	Efisiensi
					Pemanfaatan Ruang	33,55	Efisiensi
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	95,11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	69,81	Efisiensi
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,68	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	92,15	Tdk Efisiensi
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	75,75	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	88,15	Efisiensi
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. DPU 2. DLHK	76,66 90,05	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	91,68	Efisiensi
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): 1. DPU 2. DLHK	76,77 95,20	Efisiensi
37	Terwujudnya	Kelas Indeks Kapasitas	Kelas	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan	85,78	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pengurangan kerentanan risiko bencana	Bencana	Indeks		Bencana		
					Penanganan Darurat Bencana:	86,77	Efisiensi
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	9,82	Efisiensi
					Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	100	Efisiensi
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	96,53	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	0 96,00	Efisiensi
					Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	95,52	Efisiensi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	73,49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	95,69	Tdk Efisiensi
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	98,73	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	94,46	Tdk Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	98,99	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	93,2	Efisiensi
					Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	99,10	Tdk Efisiensi
					Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: 1. Kesbangpol 2. Satpol PP	98,16 96,00	Efisiensi
					Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakriminal	98,16	Efisiensi
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	96,00	Efisiensi
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	119,98	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	97,22	Efisiensi
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	99,60	Efisiensi
					Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	96,53	Efisiensi
					Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0	Efisiensi
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	98,59	Peningkatan Pelayanan Angkutan	98,03	Efisiensi



No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	102,00	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	0	Efisiensi
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	88,03	Penataan Administrasi Kependudukan	81,94	Efisiensi
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	12,53	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	94,86	Tdk efisiensi
					Transmigrasi Lokal	0	

Catatan: *) **Efisiensi Sumber Daya** diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan rerata serapan anggaran. Dianggap efisien apabila rerata serapan anggaran < pencapaian indikator kinerja sasaran. Apabila indikator kinerja sasaran serumpun diambil reratanya lalu dibandingkan dengan serapan anggaran, dan apabila indikator kinerja sasaran tidak serumpun perlakuannya ditentukan per item indikator sasaran.

Berdasarkan Tabel 3.103. sebagaimana tersebut di atas, jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi sebanyak 51 sasaran (atau 71,12% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang tidak efisien sebanyak 16 indikator sasaran (atau 23,88% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Sedangkan jumlah program yang tidak efisien dalam mendukung pencapaian sasaran sebanyak 27 program (atau 16,46% dari 164 program prioritas), dan sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas). Berdasarkan Tabel 3.102 dan Tabel 3.103, sebagaimana tersebut di atas jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupati) sebanyak Rp.749.734.071.372,- dan terealisasi sebanyak Rp.618.720.315.867,- serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 56 indikator sasaran (atau 83,58% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan jumlah program



yang mencapai efisiensi sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas), maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp. 131.013.755.505,- {dengan perhitungan: Jumlah rencana anggaran dikurangi realisasi anggaran}.

3.4.2. Efektifitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Tabel 3.103. dipakai sebagai bahan untuk mengetahui tingkat efektifitas Sumber Daya Aparatur disandingkan dengan profile Organisasi Perangkat Daerah terkait data jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai bahan analisis. Data jumlah Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.102.

Tabel 3.102.
Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020

Bagian/ Dinas/ Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.	Sekretariat Daerah	5	0	1	4	0	0	0	0	0
	Bagian Pemerintahan Setda	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Hukum Setda	6	7	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Perekonomian Setda	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Pembangunan Setda	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Kesra Setda	7	4	0	0	1	0	2	0	0
	Bagian Organisasi Setda	8	5	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Humas Setda	10	8	0	0	0	0	3	0	0
	Bagian Umum Setda	31	21	0	0	1	0	3	0	0
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	10	3	0	0	1	0	3	0	0
02	Sekretariat DPRD	32	7	0	1	3	0	7	0	0
03	Inspektorat	29	21	0	1	4	0	3	0	0
04	Dinas Pendidikan	1851	3612	0	1	1	3	13	1	0
05	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25	18	0	0	1	3	8	0	0

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Dinas Kesehatan	308	1175	0	1	0	7	27	35	0
07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	21	22	0	1	1	3	9	0	0
08	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	17	0	0	1	2	10	0	0
09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	14	0	1	1	3	7	0	0
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	6	0	1	1	2	5	0	0
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	115	34	0	1	1	3	13	3	0
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja	18	12	0	1	1	1	8	0	0
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	7	0	1	1	2	6	0	0
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31	9	0	1	1	2	6	0	0
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267	24	0	1	2	3	19	4	0
16	Dinas Perhubungan	39	13	0	0	2	1	6	0	0
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	10	0	1	1	3	6	0	0
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	136	90	0	1	1	4	21	3	0
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10	14	0	1	1	2	6	0	0
20	Satuan Polisi Pamong Praja	47	5	0	1	3	8	0	0	0
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	28	10	0	1	1	3	9	0	0
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	59	37	0	1	4	1	17	0	0
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20	14	0	1	1	4	10	0	0
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	8	0	1	0	4	8	0	0
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	5	0	0	1	0	4	0	0
26	Kecamatan Klaten Tengah	25	20	0	0	1	1	9	20	0
27	Kecamatan Klaten Selatan	7	11	0	0	1	1	4	5	0
28	Kecamatan Klaten Utara	15	16	0	0	1	1	4	10	0
29	Kecamatan Kebonarum	7	8	0	0	1	0	2	2	0

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	Kecamatan Wedi	13	9	0	0	1	1	3	2	0
31	Kecamatan Kalikotes	9	8	0	0	1	0	3	2	0
32	Kecamatan Ngawen	5	9	0	0	1	1	3	1	0
33	Kecamatan Jogonalan	8	7	0	0	1	1	2	1	0
34	Kecamatan Karangnongko	16	6	0	0	1	1	3	1	0
35	Kecamatan Manisrenggo	15	6	0	0	1	1	3	2	0
36	Kecamatan Gantiwarno	9	6	0	0	1	1	2	2	0
37	Kecamatan Prambanan	10	10	0	0	1	1	3	2	0
38	Kecamatan Kemalang	17	4	0	0	1	1	1	3	0
39	Kecamatan Jatinom	10	8	0	0	1	0	2	4	0
40	Kecamatan Karanganyam	9	8	0	0	2	0	3	0	0
41	Kecamatan Tulung	17	6	0	0	1	1	2	1	0
42	Kecamatan Polanharjo	14	3	0	0	1	1	2	2	0
43	Kecamatan Pedan	13	4	0	0	1	2	3	1	0
44	Kecamatan Karangdowo	13	6	0	0	1	1	2	3	0
45	Kecamatan Trucuk	10	5	0	0	1	3	2	0	0
46	Kecamatan Bayat	11	5	0	0	1	2	2	0	0
47	Kecamatan Delanggu	9	7	0	0	1	1	1	0	0
48	Kecamatan Wonosari	16	6	0	0	1	0	2	1	0
49	Kecamatan Cawas	11	10	0	0	1	1	3	2	0
50	Kecamatan Ceper	12	6	0	0	1	1	3	2	0
51	Kecamatan Juwiring	11	7	0	0	1	1	3	2	0
Jumlah		3545	5445	1	23	65	81	335	122	0

Sumber: BKPD, dan Setda Bagian Organisasi, 2021 (Diolah).

Keterangan:

	Efektif	77,97%
	Ada yang efektif, dan ada yang tidak efektif	22,03%
	Tidak efektif	0%

Penilaian tingkat efektifitas sumber data dihitung berdasarkan capaian indikator sasaran yang mempunyai tingkat efisiensi sebagaimana Tabel 3.102. dan Tabel 3.103..



BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2020 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- Sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 64,18% dengan Kriteria ***Sangat Tinggi***;
- Sebanyak 7 (*tujuh*) atau sebanyak 10,45% dengan Kriteria ***Tinggi***;
- Sebanyak 1 (*satu*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 1,49% dengan kriteria ***Sedang***; dan
- Sebanyak 9 (*sembilan*) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 13,43% dengan Kriteria ***Sangat Rendah***.

B. Indikator Regresif, dengan hasil semua indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 5 (lima) indikator, dan tidak berhasil menekan dengan skala ≥ 100 sebanyak 2 (dua) indikator.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 95% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%).

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasar tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi sebanyak 51 indikator sasaran (atau 71,12% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang tidak efisien sebanyak 16 indikator sasaran (atau 23,88% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Sedangkan jumlah program yang tidak efisiensi dalam mendukung pencapaian sasaran sebanyak 27 program (atau 16,46% dari 164 program prioritas), dan sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas). Berdasarkan Tabel 3.102 dan Tabel 3.103, sebagaimana tersebut di atas jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*) sebanyak Rp.749.734.071.372,- dan terealisasi sebanyak Rp.618.720.315.867,- serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 56 indikator sasaran (atau 83,58% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan jumlah program yang mencapai efisiensi sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas), maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp. 131.013.755.505,- {dengan perhitungan: Jumlah rencana anggaran dikurangi realisasi anggaran}.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKjIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan: (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- b. Berpedoman pada pencapaian kinerja sasaran tahun 2020, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian pada tahun 2021, diantaranya:
 - a) Mengupayakan penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD;
 - b) Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,43% dan menekan inflansi pada angka 3,5 (± 1)%
 - c) Meningkatkan Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada angka 69% dan mengupayakan tingkat PDRB Per Kapita sebesar Rp.24.720.000,-
 - d) Meningkatkan Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA, seiring dengan



meningkatnya nilai investasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Klaten, 29 Januari 2021



BURATI KLATEN,

SRI MULYANI



LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2020

1. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2019
2. Prestasi Juara 3 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2020
3. Penghargaan Kabupaten Klaten masuk 25 Kabupaten/Kota Percontohan Pelaksanaan Smart City diterima oleh Sekda Klaten Jaka Sawaldi yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten, Amin Mustofa, pada acara Gerakan Menuju 100 Smart City yang diadakan di Balai Sudirman Jakarta (4/11/19)
4. Penghargaan Pemenang Lomba TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENGANUGERAHKAN

PENGHARGAAN

KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

SEBAGAI KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2019

JAKARTA, 7 DESEMBER 2020

YASONNA H. LAOLY

2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:045/2135

Diberikan Kepada:

Kabupaten Klaten

Sebagai:

JUARA III

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2020 yang diselenggarakan tanggal 10 November 2020 di The Wujil Resort and Conventions

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

[Signature]
Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640801 198712 1 001

Dipindai dengan Cam



Gerakan Menuju

100

Smart City
2019

KABUPATEN KLATEN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO



Piagam Penghargaan

Nomor Penghar / 159 / X / 2020

PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO

Memberikan penghargaan kepada :

KODIM 0723/KLATEN

PERINGKAT - I

PENILAIAN LOMBA TNI MANUNGGAL KB KESEHATAN (TMKK)
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-75 TNI KODAM IV/DIPONEGORO
WILAYAH KODAM IV/DIPONEGORO TK. PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Semarang, 27 - 10 - 2020

Panglima Kodam IV/Diponegoro,

Bakti Agus Fadri, S.I.P., M.Si.
Mayor Jenderal TNI



PEMENANG III
KATEGORI KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN Klaten
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN RI
KEMENTERIAN KEMAHANINGRAHAN RI
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN RI
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN RI
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKOTAAN RI

PERINGKAT I
PEMENANG LOMBA PENYIARAN TRI MANUNGGAH
KELUARGA BERENCANA KESEHATAN (TKM)
Kodim 0723 Kabupaten Klaten
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020



GUBERNUR JAWA TENGAH
PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 002.5 / 0017340

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/51 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pemenang Lomba
Tentara Nasional Indonesia Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Diberikan kepada:

Kodim 0723 / KLATEN

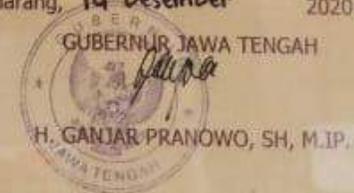
sebagai :

PEMENANG I

Lomba TNI Manunggal KB Kesehatan
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Semarang, 14 Desember 2020



LAMPIRAN II

Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

